

**KERJASAMA PEMERINTAH PUSAT DENGAN  
PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI  
BENCANA BANJIR DI KOTA BIMA**

MUH RAMADHAN

Nomor Stambuk : 1056 40186213



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2018**

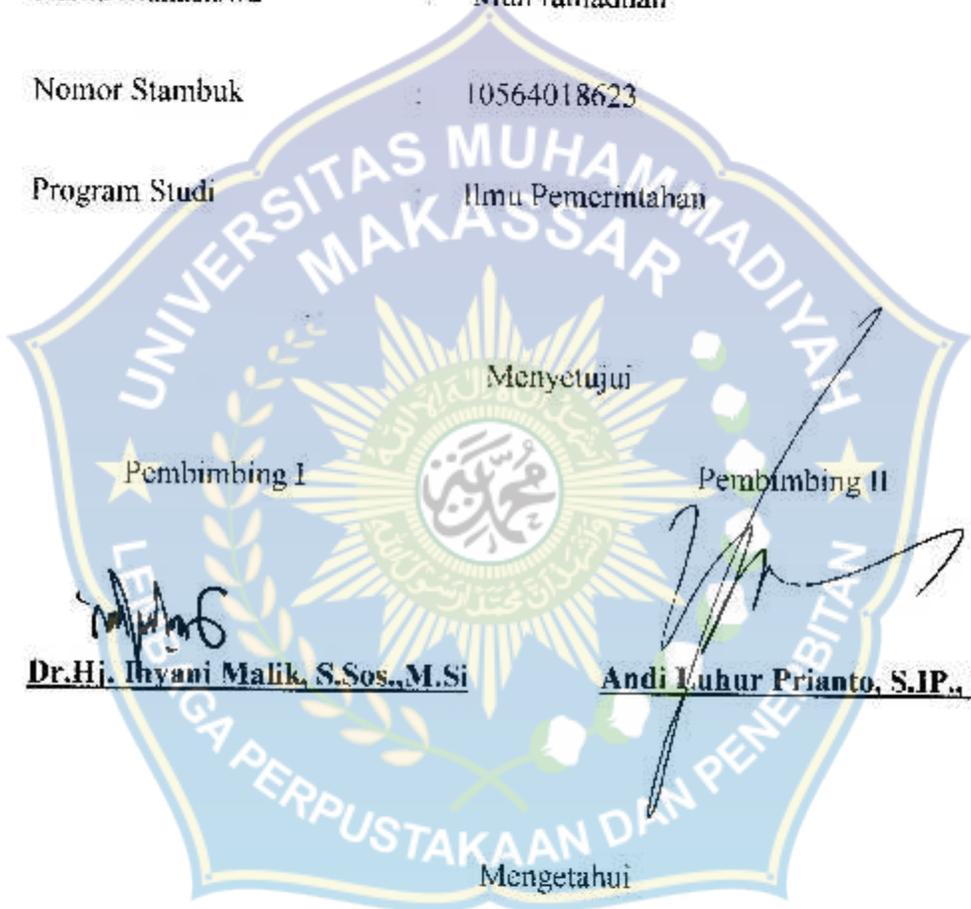
## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kerjasama Pemerintah Pusat Dengan  
Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan  
Dampak Perubahan Iklim Di Kota Bima

Nama Mahasiswa : Muh ramadhan

Nomor Stambuk : 10564018623

Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si

Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

Mengetahui

Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar

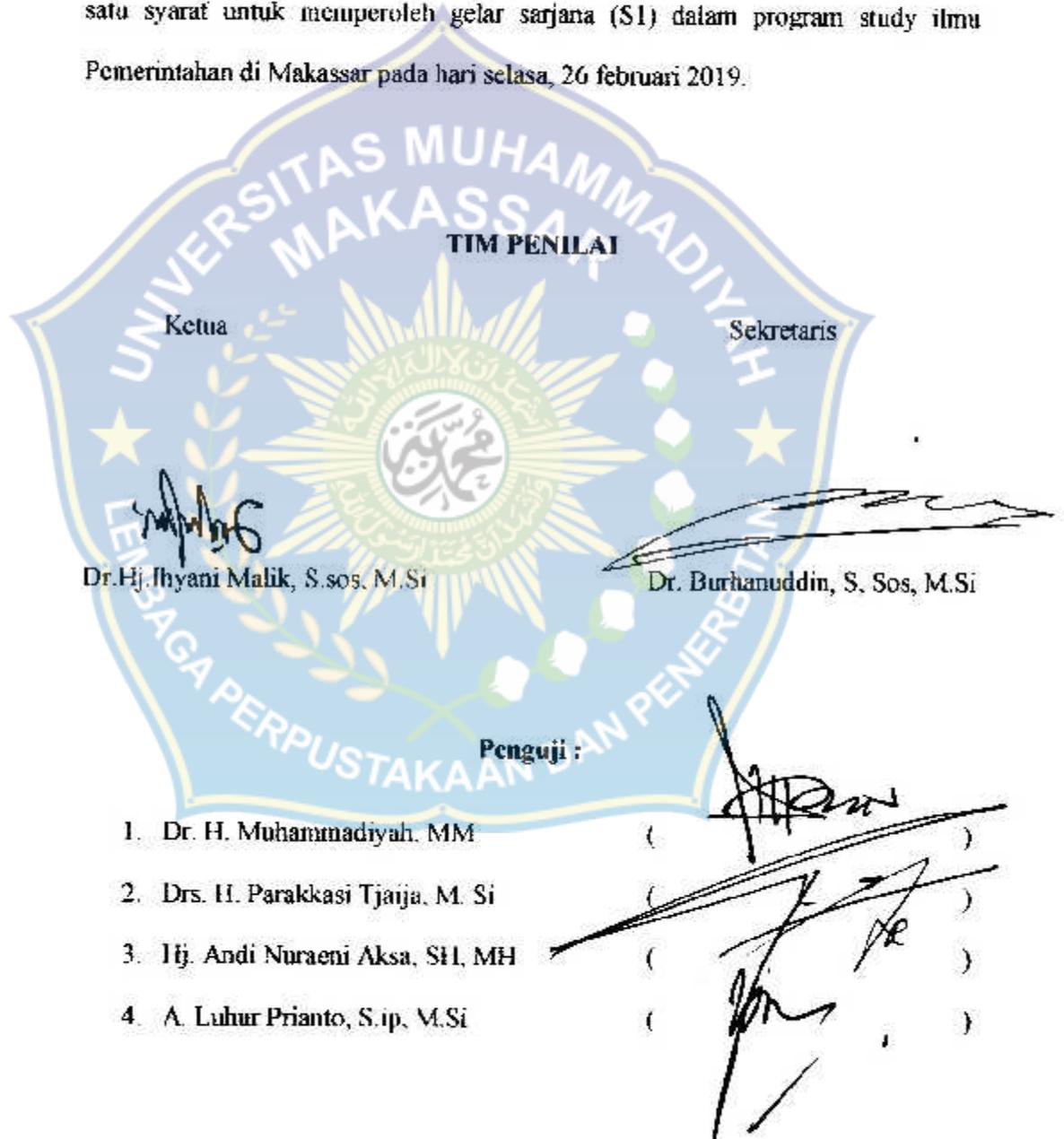
Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fisipol Unismuh Makassar

Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si

Dr. Nurvanti Mustari, S.IP., M.Si

## PRNRTIMAAN TIM

Telah di terima penerimaan TIM penguji Skripsi fakultas ilmu social dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0013/FSP/A.3-VIII/I/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program study ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari selasa, 26 febuari 2019.



**TIM PENILAI**

Ketua Sekretaris

Dr.Hj.Ihyani Malik, S.sos, M.Si Dr. Burhanuddin, S. Sos, M.Si

**Penguji :**

1. Dr. H. Muhammadiyah. MM ( )
2. Drs. H. Parakkasi Tjaija. M. Si ( )
3. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH ( )
4. A. Luhur Prianto, S.ip, M.Si ( )

## DAFTAR ISI

Sampul .....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Daftar Isi.....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Pengawasan Pemerintah.....	7
B. Konsep Pemerintah Daerah.....	15
C. Konsep Perubahan Iklim.....	18
D. Kerangka Pikir.....	22
E. Fokus Penelitian.....	23
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	24
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	27
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	27
C. Sumber Data.....	27
D. Informan Penelitian.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	29

G. Keabsahan Data.....	30
------------------------	----

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	31
B. Analisis Cuaca Ekstrim di Kota Bima 2016 Oleh (BMKG) .....	45
C. Data Dampak Banjir Kota Bima 2016 Oleh (BPBD) .....	55
D. Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Perubahan Iklim di KotaBima.....	61

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA .....	75
----------------------	----

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SubhanahuWata'alayang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***"Kerjasama Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim di Kota Bima"***. Serta tak lupa kita curahkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang tentunya sepenuh hati meluangkan waktu dengan ikhlas memberikan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga terkhusus pada dosen pembimbing Ibu Dr.Hj. Ihyani malik,S.Sos, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si selaku pembimbing II yang dengan tulus membimbing penulis, meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, M.M., Selaku Rektor Unniversitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari. S.IP.,M.SI. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staf Fisipol Unniversitas Muhammadiyah Makassar
5. Kedua orang tua tercinta yang telah mendidik, mengarahkan dan senantiasa mendoakan serta memberi dukungan yang tiada ternilai baik moral maupun materi serta nasehat dan pengorbanan yang takterhingga.
6. Para sahabat yang selalu membantu, menyemangati dan memberikan nasehat selama ini dan menemani dari awal perkuliahan sampai sekarang demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis/skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 17 Agustus 2018

**Muh Ramadhan**

## ABSTRAK

**MUH RAMADHAN 2018. *Kerjasama Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Dampak Perubahan Iklim Di kota Bima*** (dibimbing oleh ibunda Ihyani Malik dan ayahanda Andi Luhur Prianto).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kerjasama Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan dampak perubahan iklim di Kota Bima Nusa Tenggara Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskripsi kualitatif dengan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian adalah wawancara dengan informan lima orang, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama Pemerintah Pusat dalam hal ini BMKG stasiun muhammad salahuddin bima dan Pemerintah Daerah badan penanggulangan bencana daerah dalam penanggulangan dampak perubahan iklim di Kota Bima Nusa Tenggara Barat sangat efektif dengan melakukan kerjasama pendahuluan yaitu sosialisasi bahaya forestrasi kepada masyarakat oleh pemerintah pusat dan pembentukan kelurahan tangguh bencana oleh pemerintah daerah, Setelah melakukan Kerjasama pendahuluan pemerintah kembali melakukan Kerjasama saat kerja berlangsung dimana tindakan tersebut sangat membantu masyarakat dengan melakukan informasi peringatan dini yang dilakukan BMKG dan kegiatan tanggap darurat yang dilakukan pemerintah daerah yaitu BPBD yang di bantu beberapa instansi terkait, dan pemerintah kembali melakukan Kerjasama *feed back* yaitu dengan melakukan analisis dari proses perubahan iklim yang menyebabkan banjir bandang dan melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

**Kata Kunci:** Kerjasama, Penanggulangan, Dampak Perubahan iklim

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kabupaten Bima berdiri pada tanggal 5 juli 1640 M, ketika sultan abdul kahir (la kai) di nobatkan sebagai sultan bima 1 yang menjalankan syariat islam. Peristiwa ini di tetapkan sebagai hari jadi bima yang di peringati setiap tahun. Bukti bukti sejarah kepurbakalaan yang di temukan di kabupaten bima seperti wadu pa'a, wadu nocu, wadu tunti (batu bertulis) di dusun padende kecamatan donggo menunjukan bahwa daerah ini sudah lama dihuni manusia.

Di era globalisasi sekarang ini iklim yang ada di Indonesia tidak menentu di sebabkan karena pemanasan global yang terjadi di dunia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas dan di tentukan berdasarkan perhitungan dalam waktu yang lama (kurang lebih 30 tahun). Unsur-unsur iklim sama dengan unsur-unsur cuaca. Unsur-unsur iklim terbagi atas 6 unsur suhu udara, tekanan udara, Kelembapan udara, awan, angin, hujan, ke enam unsur tersebut sama dengan unsur-unsur cuaca. Perubahan iklim global merupakan salah satu isu lingkungan penting dunia dewasa ini, artinya tidak dibicarakan di Indonesia tetapi juga di Negara-negara lain diseluruh dunia. Hal ini disebabkan perubahan iklim global menyebabkan dampak negative pada berbagai sector kehidupan. Beberapa dampak yang dirasakan karena adanya perubahan iklim antara lain terjadinya

peningkatan suhu rata-rata serta peningkatan intensitas curah hujan dan bergesernya musim hujan.

Dalam prespektif kebencanaan, kota tangguh bencana sesungguhnya sebuah kota yang memiliki kemampuan (kapasitas) yang lebih tinggi dari kerentanannya, baik dari aspek manusianya, lingkungannya, insfrastruktur, ekonomi, social budaya dan politiknya. Sehingga resiko yang dihadapipun secara praktis lebih kecil dibandingkan kota /kabupaten lain yang memiliki kapasitas rendah (termasuk kabupaten Sumbawa). Dalam hal ini kota bima termaksud kedalam wilayah yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan beberapa daerah mengalami bencana banjir.

Sebagai kota yang dijadikan modal percontohan kota tangguh bencana nasional, kota bima sudah memimiliki perangkat dan sistem yang mendukung ketangguhan itu. Antara lain perda no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana (RAD-PRB), rencana penanggulangan bencana (RPB) yang menjadi acuan atas rencana pembangunan daerah. Pada BAB IV tentang badan penanggulangan bencana daerah pasal 8 di jelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah daerah membentuk badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPBD menyusun standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman teknis penanganan penanggulangan bencana, dan standar operasional prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota

Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa terletak didaerah hilir yang merupakan *outlet* dari akumulasi air didaerah hulu. Berdasarkan unit lahanya, Kota Bima tergolong dalam sistem lahan nanga nae, nanga nae merupakan sistim lahan yang memiliki didominasi oleh tanah yang di cirikan terletak di bagian hilir. Sistim lahan di rincikan oleh drainase yang kurang baik, sehingga hujan yang jatuh tidak dapat menampung akan terjadi banjir.

Salah satu masalah yang di akibatkan oleh faktor penggundulan hutan. Factor ekonomi menjadi permasalahan beberapa daerah di Indonesia menyebabkan masyarakat sering salah langkah dalam usaha untuk memenuhi hajat hidupnya. Kawasan hulu yang seharusnya menjadi penahan air sehingga tidak segera bergerak menuju lihir tidak befungsi secara mestinya.

Pola pemukiman di Kota Bima yang notabene terletak di daerah hilir, sangat dekat dengan sungai. Asosiasi antara sungai dengan pemukiman tersebut menyebabkan masyarakat akan terpapar \terhadap bencana banjir, khususnya banjir luapan. Empat factor yang berkolaborasi tersebut menyebabkan banjir bandang dan banjir luapan sehingga menyebabkan kerugian dari satu triliun. Banjir yang terjadi di wilayah Kota Bima, di picu oleh hujan ekstrim selama dua hari terakhir. Terjadi hujan deras di karenakan adanya siklon tropis Yvette yang saat ini posisinya berada di samudra hindia selatan Bali sekitar 620 km sebelah selatan Denpasar. Arah dan kecepatan gerak utara timur laut, menyebabkan hujan deras di wilayah Indonesia bagian selatan.

Berdasarkan data curah hujan dari pos hujan kerja sama BMKG di wilayah NTB yang terkena dampak banjir terlihat bahwa curah hujan dengan intensitas yang cukup tinggi terjadi pada tanggal 30-31 januari 2016. Khususnya pada tanggal, 31, beberapa pos hujan kerja sama di Kecamatan Asakota (kelurahan kolo) Kota Bima mencatatkan nilai curah hujan ekstrim yaitu 227,5 mm, woja 170 mm, rasa nae timur 122 mm, madapangga 180 mm (kriteria curah hujan eksream  $>100$  mm / hari ). Distribusi curah hujan di beberapa titik wilayah terdampak tanggal 31 januari 2016.

Berdasarkan data dan fakta yang telah di kemukakan di atas bahwa perubahan iklim yang terjadi di Kota Bima sulit di prediksi karena perubahan iklim yang terjadi sangat tiba-tiba dan sulit di prediksi oleh BMKG

Setelah mengkaji uraian di atas maka penulis terinspirasi untuk memilih judul tentang ***“Kerjasama Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim Di Kota Bima”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas maka rumusan masalah ini adalah: Bagaimana Kerjasama Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim di Kota Bima?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui Kerjasama Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim Di Kota Bima.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dilakukan untuk meninjau dan menganalisis bagaimana Kerjasama Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim Di Kota Bima untuk itu penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. secara teoritis.

adalah untuk memperkaya dan menambah pengetahuan penulis tentang Kerjasama Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim Di Kota Bima sehingga penelitian ini dapat berguna dan sebagai masukan sebagai penulis yang berminat untuk meneliti lebih jauh tentang kerjasama terhadap dampak perubahan iklim.

2. secara praktis.

penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan dan penyempurnaan teori-teori di dalam ilmu pengetahuan tentang kerjasama Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Perubahan Iklim Di Kota Bima.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Konsep dan Teori

##### 1. Konsep Kejasama Pemerintahan.

Secara etimologi kerjasama berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperations* yang memiliki arti kerja bersama-sama, dalam kamus besar bahasa Indonesia, kerjasama diartikan sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan beberapa orang atau lembaga pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama.

Secara terminologis kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama merupakan interaksi yang paling penting karena pada hakikatnya manusia tidaklah bisa hidup sendiri tanpa orang lain sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain. Kerjasama dapat berlangsung manakala individu-individu yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama guna mencapai kepentingan mereka tersebut.

Dalam sebuah lembaga ataupun perusahaan biasanya kerja sama tim telah menjadi suatu kebutuhan untuk mewujudkan keberhasilan dalam mencapai tujuannya. Kerja sama tim bisa menjadi sebuah dorongan sebagai energi ataupun motivasi bagi setiap individu yang tergabung dalam tim kerja tersebut. Apabila kerja sama tim bisa berjalan baik, maka kelancaran dalam komunikasi dan rasa tanggung jawab setiap individu dalam tim akan dapat terbentuk.

Berikut terdapat beberapa pengertian kerjasama yang di kemukakan oleh beberapa pakar yaitu :

- a. (Abu Ahmadi, 2007,101) mengatakan bahwa kerjasama berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar, Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.
- b. Sedangkan dalam istilah administrasi, pengertian kerjasama sebagaimana yang dijelaskan oleh Hadari Nawawi adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja,
- c. Menurut Lewis Thomas dan Elaine B. Johnson ( 2014, h. 164) kerjasama adalah pengelompokan yang terjadi di antara makhluk-makhluk hidup yang kita kenal. Kerja sama atau belajar bersama adalah proses beregu (berkelompok) di mana anggota-anggotanya mendukung dan saling mengandalkan untuk mencapai suatu hasil mufakat. Ruang kelas suatu tempat yang sangat baik untuk membangun kemampuan kelompok (tim), yang anda butuhkan kemudian di dalam kehidupan.
- d. Menurut Robert L. Clitrap dalam Roestiyah (2008, h. 15) menyatakan Kerjasama adalah merupakan suatu kegiatan dalam berkelompok untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu tugas secara bersama-sama”, dalam kerjasama ini biasanya terjadi interaksi antar anggota kelompok dan mempunyai tujuan yang sama untuk dapat dicapai bersama-sama.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah keinginan untuk bekerja secara bersama-sama dengan orang lain secara keseluruhan dan menjadi bagian dari kelompok dalam memecahkan suatu permasalahan.

## 2. Teori Kerjasama

Menurut Zainudin dalam website <http://www.etd.library.ums.ac.id> kerjasama merupakan Kepedulian satu orang atau satu pihak dengan orang atau pihak lain yang tercermin dalam suatu kegiatan yang menguntungkan semua pihak dengan prinsip saling percaya, menghargai dan adanya norma yang mengatur, makna kerjasama dalam hal ini adalah kerjasama dalam konteks organisasi, yaitu kerja antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (seluruh anggota).

Sedangkan Menurut Pamudji dalam bukunya yang berjudul “Kerjasama Antar Daerah” (1985:12 -13). Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika satu unsur tersebut tidak termuat dalam satu obyek yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada obyek itu tidak terdapat kerjasama. Unsur dua pihak, selalu menggambarkan suatu himpunan yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga interaksi untuk mewujudkan tujuan bersama penting dilakukan. Apabila hubungan atau interaksi itu tidak ditujukan pada

terpenuhinya kepentingan masing-masing pihak, maka hubungan yang dimaksud bukanlah suatu kerjasama. Suatu interaksi meskipun bersifat dinamis, tidak selalu berarti kerjasama. Suatu interaksi yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses interaksi, juga bukan suatu kerjasama. Kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang seimbang, serasi dan selaras.

Menurut Thomson dan Perry dalam Keban (2007:28 ), Kerjasama memiliki derajat yang berbeda, mulai dari koordinasi dan kooperasi (cooperation) sampai pada derajat yang lebih tinggi yaitu collaboration. “Para ahli pada dasarnya menyetujui bahwa perbedaan terletak pada kedalaman interaksi, integrasi, komitmen dan kompleksitas dimana cooperation terletak pada tingkatan yang paling rendah. Sedangkan collaboration pada tingkatan yang paling tinggi”.

Menurut Rosen dalam Keban (2007:32 ). “Secara teoritis, istilah kerjasama (cooperation) telah lama dikenal dan dikonsepsikan sebagai suatu sumber efisiensi dan kualitas pelayanan. Kerjasama telah dikenal sebagai cara yang jitu untuk mengambil manfaat dari ekonomi skala (economies of scales). Pembelian atau pembelian bersama misalnya, telah membuktikan keuntungan tersebut, dimana pembelian dalam skala besar atau melebihi “threshold points”, akan lebih menguntungkan daripada dalam skala kecil. Dengan kerjasama tersebut biaya overhead (overhead cost) akan teratasi meskipun dalam skala yang kecil. Sharing dalam investasi misalnya, akan memberikan hasil yang memuaskan dalam penyediaan fasilitas sarana dan

prasarana. Kerjasama juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan misalnya dalam pemberian atau pengadaan fasilitas, dimana masing-masing pihak tidak dapat membelinya sendiri. Dengan kerjasama, fasilitas pelayanan yang mahal harganya dapat dibeli dan dinikmati bersama seperti pusat rekreasi, pendidikan orang dewasa, transportasi dan sebagainya”.

Menurut Tangkilisan (2005:86) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Publik Lingkungan ekstern maupun intern, yaitu semua kekuatan yang timbul diluar batas- batas organisasi dapat mempengaruhi keputusan serta tindakan didalam organisasi. Karenanya perlu diadakan kerjasama dengan kekuatan yang diperkirakan mungkin akan timbul. Kerjasama tersebut dapat didasarkan atas hak, kewajiban dan tanggungjawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.

Dwight Waldo dalam Hamdi (2007: 41) menyatakan bahwa pada umumnya suatu keadaan berimplikasi pada semakin banyaknya kebutuhan, dan juga semakin berkembangnya potensi, untuk tatanan kerjasama yang bersifat horizontal ketimbang kerjasama yang bersifat vertikal.

Kerjasama dapat dilakukan dengan beberapa bentuk perjanjian dan pengaturan. Hal ini dijelaskan oleh Rosen dalam Keban (2007:33) bahwa bentuk perjanjian (forms of agreement) dibedakan atas :

1. Handshake Agreements, yaitu pengaturan kerja yang tidak didasarkan atas perjanjian tertulis.
2. Written Agreements, yaitu pengaturan kerjasama yang didasarkan atas perjanjian tertulis.

Dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan kerjasama hanya dapat tercapai apabila diperoleh manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya (win- win). Apabila satu pihak dirugikan dalam proses kerjasama, maka kerjasama tidak lagi terpenuhi. Dalam upaya mencapai keuntungan atau manfaat bersama dari kerjasama, perlu komunikasi yang baik antara semua pihak dan pemahaman sama terhadap tujuan bersama”

### **3. Bentuk Bentuk Kerjasama.**

Ada tiga jenis kerjasama yang di dasarkan perbedaan di dalam organisasi, grup atau di dalam sikap grup, yaitu :

#### **a. Kerjasama primer**

Di sini grup dan individu sungguh sungguh di lebur menjadi satu. Grup berisi seluruh kehidupan daripada individu, dan masing-masing saling mengejar untuk masing-masing pekerjaan, demi kepentingan seluruh anggota dalam grup itu. Contohnya adalah kehidupan rutin sehari-hari dalam biara, kehidupan keluarga pada masyarakat primitive dan lain-lainnya.

Di dalam kelompok-kelompok kecil seperti keluarga dan komunitas-komunitas tradisional proses sosial yang namanya koperasi ini cenderung bersifat spontan. Inilah koperasi yang terbentuk secara wajar di dalam kelompok kelompok yang disebut kelompok primer. Di dalam kelompok-kelompok ini individu-individu cenderung membaurkan diri dengan sesamanya didalam kelompok, dan masing-masing hendak berusaha menjadi bagian dari kelompoknya. Di dalam kelompok-kelompok primer

yang kecil dan bersifat tatap muka ini, orang perorang cenderung lebih senang bekerja dalam tim selaku anggota tim daripada bekerja sendiri sebagai perorangan.

b. Kerjasama sekunder

Apabila kerjasama primer karakteristiknya ada masyarakat primitif, maka kerjasama sekunder adalah khas pada masyarakat modern. Kerjasama sekunder ini sangat di formalisir dan spesialisir, dan masing-masing individu hanya membaktikan sebagian dari pada hidupnya kepada grup yang dipersatukan dengan itu. Sikap orang-orang disini lebih individualitis dan mengadakan perhitungan-perhitungan. Contohnya adalah kerjasama dalam kantor-kantor dagang, pabrik-pabrik, pemerintah dan sebagainya.

c. Kerjasama tertier

Dalam hal ini yang menjadi dasar kerjasama yaitu adalah konflik yang laten. Sikap-sikap dari pihak yang kerjasama adalah murni oportunistis. Organisasi mereka sangat longgar dan gampang pecah, bila alat bersama itu tidak lagi membantu masing-masing pihak dalam mencapai tujuannya. Contohnya adalah hubungan buruh dan pimpinan perusahaan, hubungan dua partai dalam usaha melawan partai ketiga,

Ada beberapa cara yang dapat menjadikan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati oleh dua orang atau dua instansi pemerintah tersebut yaitu:

- a. Saling terbuka, dalam sebuah tatanan kerjasama yang baik harus ada komasi yang komunikatif antara dua orang atau dua organisasi yang berkerjasama atau unik lebih.
- b. Saling mengerti, kerjasama berarti dua orang atau lebih bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, dalam proses tersebut, tentu ada, salah satu yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapkan.

#### **4. Faktor Pendukung dan Penghambat Kerjasama**

##### **1. Faktor penghambat dalam kerjasama**

Sekumpulan orang belum tentu merupakan suatu tim. Orang-orang dalam suatu kelompok tidak secara otomatis dapat bekerjasama. sering kali tim tidak dapat berjalan sebagaimana yang di harapkan penyebab adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi pribadi anggota tim Sudah merupakan hal yang alamiah bila seseorang ingin tahu apakah mereka cocok di suatu organisasi, termasuk di dalam suatu tim. Orang menghawatirkan hal-hal seperti kemungkinan menjadi outsiders, pergaulan dengan anggota lainnya, faktor pengaruh dan saling percaya antar tim .
- b. Hubungan antar anggota tim Agar setiap anggota dapat bekerjasama, mereka saling mengenal dan berhubungan. Untuk itu dibutuhkan waktu bagi anggota nya untuk saling bekerjasama.
- c. Identitas tim di dalam organisasi. Faktor ini terdiri dari dua aspek, yang pertama adalah kesesuaian atau kecocokan tim di dalam organisasi dan

yang kedua pengaruh keanggotaan tim tertentu terhadap hubungan dengan anggota.

## 2. Faktor pendukung dalam kerjasama

Ada 5 strategi dalam pencapaian tujuan diantaranya adalah :

- a. Saling ketergantungan diperlukan di antara para anggota tim dalam hal ini informasi, sumber daya, pelaksanaan tugas dan dukungan. Adanya ketergantungan dapat memperkuat kebersamaan tim
- b. Perluasan tugas, Setiap tim harus diberi tantangan, karena reaksi atau tanggapan tantangan tersebut akan membantu semangat persatuan, kebanggaan dan kesatuan tim.
- c. Bahasa yang umum, Setiap tim harus menguasai bahasa yang umum dan mudah di mengerti agar supaya kerjasama tetap berjalan sesuai rencana.
- d. Penajajaran, Anggota tim harus bersedia menyisihkan sikap individualismenya dalam rangka mencapai rangka misi bersama.
- e. Keterampilan menangani konfrontasi atau konflik  
Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Oleh karena itu dibutuhkan keterampilan dalam penerimaan perbedaan pendapat dan menyampaikan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain tanpa harus menyakiti orang lain.

## **B. Konsep Pemerintah Pusat**

### **1. Pengertian pemerintah**

Pemerintahan pusat adalah penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil

Presiden dan oleh menteri-menteri negara. Dengan kata lain, pemerintahan pusat adalah pemerintahan secara nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di daerah tertentu. Ada beberapa definisi dari sistem pemerintahan. Demikian pula, ada berbagai jenis pemerintahan di dunia.

Adapun Pemerintah dalam pengertian terminologis atau istilah, terdapat pengertian yang di kemukakan oleh pakar di antaranya :

- a. Menurut Suradinata Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuatan besar di negeri ini, termasuk urusan publik, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara.
- b. Menurut H Muhammad Rohidin Pranadjaja Dalam bukunya yang berjudul "Hubungan antara instansi pemerintah", gagasan Pemerintah menjelaskan bahwa "Istilah ini berasal dari Pemerintah kata perintah, yang berarti kata-kata yang bermaksud disuruh melakukan sesuatu, sesuatu harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat dihapus atau memberi perintah (Pranadjaja, 2003: 24)
- c. Menurut M. Kusnardi Pemerintah adalah Mengedepankan gagasan pemerintah sebagai yang peduli dibuat oleh negara untuk mengatur kesejahteraan rakyat atau warga dan kepentingan rakyatnya dan untuk melaksanakan dan melakukan tugas eksekutif, legislatif dan yudikatif.

- d. W.S. Saire Menjelaskan bahwa pemerintah dalam definisi terbaik adalah organisasi negara-negara yang muncul dan berjalan kekuasaan. Sementara Merriam pemberitahuan tujuan pemerintah yang mencakup keamanan eksternal, agar intern, keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan kebebasan.
- e. Menurut Wilson (1903:572) Pemerintah adalah kekuatan pengorganisasian, tidak selalu dikaitkan dengan organisasi angkatan bersenjata, tapi dua atau sekelompok orang dari berbagai kelompok masyarakat yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dengan mereka, dengan hal-hal yang memberikan perhatian urusan publik publik.
- f. Menurut Apter (1965:84) Pemerintah adalah merupakan anggota yang paling umum memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara sistem yang mencakup rentang tersebut, itu adalah bagian dan monopoli praktis kekuasaan koersif.

Dari berbagai pendapat pakar tentang devinisi pemerintah tersebut kiranya dapat di pahami bahwa Pemerintah memiliki rasa otoritas dan sistem tenaga menjalankan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian daripadanya. Ini menyimpulkan bahwa pemerintah adalah sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem kebijakan pemerintah dan ditetapkan untuk negara.

## 2. Teori pemerintahan

Koswara (2002 : 29) mengemukakan bahwa yang dimaksud pemerintahan adalah:

- a. dalam arti luas meliputi seluruh kegiatan pemerintah, baik menyangkut bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif,
- b. dalam arti sempit meliputi kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif.

Selanjutnya Koswara (1999 : 5) menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan adalah : Ilmu pengetahuan yang secara mandiri menyelenggarakan studi tentang cara-cara bagaimana pemerintahan negara disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun eksternal dalam upaya mencapai tujuan negara. Ilmu pemerintahan merupakan ilmu terapan karena mengutamakan segi penggunaan dalam praktek, yaitu dalam hal hubungan antara yang memerintah (penguasa) dengan yang diperintah (rakyat). Obyek material ilmu pemerintahan secara kebetulan sama dengan objek material ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu hukum tata negara dan ilmu negara itu sendiri, yaitu negara. Objek formasi ilmu pemerintahan bersifat khusus dan khas, yaitu hubungan-hubungan pemerintahan dengan sub-subnya (baik hubungan antara Pusat dengan Daerah, hubungan antar yang diperintah dengan yang memerintah, hubungan antar lembaga serta hubungan antar departemen), termasuk didalamnya pembahasan output pemerintahan seperti fungsi-fungsi, sistem-sistem, aktivitas dan kegiatan, gejala dan perbuatan serta peristiwa-peristiwa pemerintahan dari elit pemerintahan yang

berkuasa. Asas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran, yang menjadi tujuan berpikirdan prinsip-prinsip yang menjadi pegangan.

Menurut Taliziduhu Ndraha, pemerintahan dapat digolongkan menjadi 2 golongan besar yaitu pemerintahan konsentratif dan dekonsentratif. Pemerintahan dekonsentratif terbagi atas pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan luar negeri. Pemerintahan dalam negeri terbagi atas pemerintahan sentral dan desentral. Pemerintahan sentral dapat diperinci atas pemerintahan umum dan bukan pemerintahan umum. Yang termasuk ke dalam pemerintahan umum adalah pertahanan keamanan, peradilan, luar negeri dan moneter.

Ermaya (1998 : 6-7) membedakan secara tajam secara pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan politik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Dari pengertian tersebut,

### 3. Fungsi pemerintah pusat

Pemerintah pusat dalam melaksana otonomi daerah memiliki tiga fungsi menurut artikel (edukasinesia.com) :

#### a. Fungsi layanan (*serficing Function*)

Fungsi pelayanan di lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam melaksanakan fungsi ini pemerintah

tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan (kepercayaan) dan sebagainya.

b. Fungsi pengaturan (*Regulating Function*)

Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan yang lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi, fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara.

c. Fungsi pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka memberdayakan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi persoalan hidup.

### **C. Konsep Pemerintah Daerah**

Istilah pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Disebut sebagai disiplin ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat-syaratnya, yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek material maupun formal, sifatnya universal, sistematis serta spesifik (khas) dan dikatakan sebagai seni, karena banyak pimpinan pemerintah yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu

berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan (syafii dkk,2002:11).

Definisi pemerintahan daerah berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut:

a. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPR menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Pemerintahan pada akhir uraiannya, adalah suatu perorganisasian kekuatan, Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang dikemukakan di atas, maka yang di maksud pemerintah daerah disini adalah peyelenggraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPR menurut asas desentralisasi dan unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati,Wali kota dan perangkat daerah.

Sedangkan menurut S. Pamudji (2009:15), dalam bukunya Kerja Sama Antar Daerah Dalam Rangka Membina Wilayah menyebutkan, bahwa yang di maksud dengan pemerintahan daerah adalah:” Pemerintahan Daerah adalah daerah otonom diselenggarakan secara bersama-sama oleh seorang kepala wilayah yang sekaligus merupakan kepala daerah otonom”.

Berdasarkan definisi yang telah di temukan di atas, maka pengertian dari Pemerintah Daerah pada dasarnya sama yaitu suatu proses kegiatan antara pihak yang berwenang memberikan perintah dalam hal ini pemerintah

dengan yang menerima dan melaksanakan perintah tersebut dalam hal ini masyarakat.

Pemerintah daerah memperoleh pelimpahan wewenang pemerintahan umum dari pusat, yang meliputi wewenang mengambil setiap tindakan untuk kepentingan rakyat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Urusan pemerintahan umum yang di maksud sebagian berangsur-angsur di serahkan kepada pemerintah daerah sebagai urusan rumah tangga daerahnya, kecuali yang bersifat nasional untuk menyangkut kepentingan umum yang lebih luas.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama dalam studi ilmu politik gejala ilmu pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari usaran kekuasaan.

Menurut Arif (2012) Peran pemerintah daerah dalam pembinaan masyarakat yaitu terbagi menjadi empat peran yaitu:

1. Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (Menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrument untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dimasyarakat. Pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi akan dikaitkan dengan kebijakan yang mendukung dalam pengembangan usahanya.

## 2. Pemerintah sebagai dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat.

## 3. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalakan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan atau permodalan.

## 4. Pemerintah sebagai katalisator

Pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan Negara yang kemudian bisa menjadi modal social untuk membangun partisipasi.

Menurut Sembiring (2012:30) fungsi pemerintah Negara termasuk pemerintah daerah dimanapun berada, sekurang-kurangnya melakukan fungsi pelayanan (*services*), fungsi pengaturan (*regulation*), dan fungsi

pemberdayaan (*empowering*), dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Menurut Hamdi (2002:8) fungsi pemerintahan yakni melakukan pengaturan dan memberikan pelayanan. Pengaturan dalam arti menegaskan bingkai kesepakatan kehidupan kolektif, agar dapat kepastian dan perilaku yang memberikan kemanfaatan pada kepentingan umum. Pelayanan terhadap hak-hak masyarakat berisi kegiatan untuk mempermudah masyarakat untuk menikmati hidupnya yang patut dan sesuai dengan nilai-nilai dan martabat kemanusiaannya. Sedangkan pelayanan terhadap kewajiban masyarakat memahami kepatuhan kolektif yang semestinya dikembangkan. Pelayanan ini kemudian sangat berkaitan dengan fungsi pemberdayaan.

#### **D. Konsep Perubahan Iklim**

Perubahan iklim adalah terjadinya perubahan kondisi atmosfer, seperti suhu, dan cuaca yang menyebabkan suatu kondisi yang tidak menentu. Perubahan ini sangat berdampak luas bagi kehidupan manusia dalam berbagai sector. Perubahan iklim juga dapat dikatakan sebagai, keadaan dimana temperatur ini akan di bumi mengalami kenaikan dan pengeseran musim. Kenaikan temperature ini akan menyebabkan terjadinya pemuatan massa air dan permukaan air laut.

Adapun teori perubahan iklim yang di kemukakan beberapa ahli terkait proses perubahan iklim :

Iklim cenderung berubah oleh ulah dan aktivitas manusia seperti urbanisasi, forestasi, industry alisasi, dan oleh aktivitas alam seperti pengeseran kontinen, letusan gunung api, perubahan orbit bumi terhadap matahari, noda matahari, dan peristiwa El nino

Terjadinya perubahan iklim merupakan fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia terutama yang berkaitan dengan bahan bakar penggunaan fosil (BBF) dan kegiatan alih guna lahan (Harmoni, 2006)

Menurut fiman 2009 terjadinya peningkatan rata-rata suhu udara menyebabkan terjadinya penguapan air yang tinggi, sehingga menyebabkan atmosfer basah dan intensi curah hujan meningkat. Menurut Naylor (2006) dalam Diposaptono (2009).perubahan pola curah hujan di Indonesia akan mengarah pada terlambatnya awal musim hujan dan kecenderungan lebih cepat berakhir musim hujan. Hal ini berartibahwa musim hujan terjadi dalam waktu yang singkat, tetapi memiliki intensitaf curah hujan lebih tinggi.

Cuaca pada pagi hari biasa udara dingin, langit cerah pada siang hari udara panas, langit berawan.Perubahan cuaca semacam ini lebih tepat disebut fruktiasi, yaitu perubahan cendrung berulang.Akan tetapi perubahan iklim baru dapat di ketahui setelah periode waktu yang panjang, beberapa ahli krimatologi menggunakan istilah kecendrungan iklim (*klimatic trend*). Teori gunung api (*volcanism theory*) letusan gunung merapi menggejeksikan partikel debu dalam atmosver terutama pelapisan troposver atas dan sratosver yang menghamburkan radiasi matahari yang datang. Di stratosver partikel debu yang sangat kecil merayang rayang sehingga menghambat masuknya

radiasi matahari kepermukaan bumi yang menyebabkan suhu permukaan bumi turun.

Konsekuensi perubahan iklim adalah tantangan signifikan terhadap lingkungan, ekonomi global dan kesehatan manusia, dengan perubahan yang mempengaruhi generasi yang mendatang. Pembangunan berkelanjutan sangat krusial dalam kerangka mitigasi yang sukses terhadap perubahan iklim. Tidak hanya generasi mendatang saja yang berada dalam ancaman bahaya, beberapa masyarakat di wilayah tertentu telah mengalami dampak perubahan iklim seperti pulau-pulau kecil dan beberapa Negara berkembang.

Tindakan nyata dalam rangka mitigasi dampak perubahan iklim membutuhkan :

1. focus pada keadilan dan kesinambungan pembangunan dengan bekerja pada berbagai tingkatan;
2. kerja sama secara konstruktif pada tingkat internasional; dan
3. kebijakan nasional yang kuat dan juga secara individual (London 2006).

Perubahan iklim tidak berdampak secara merata terhadap lingkungan dan berbagai penduduk di dunia. Amerika Serikat memproduksi 28% gas rumah kaca hanya mempunyai penduduk sebanyak 5 % dari penduduk dunia. Kemampuan suatu Negara atau wilayah untuk menangani perubahan iklim tergantung pada tingkat kekayaan, teknologi dan infrastrukturnya.

Negara dengan tingkat pendapatan menengah kebawah, tidak memiliki industri, transportasi, atau sistem pertanian yang intensif memiliki

kemampuan terbatas untuk melindungi diri sendiri terhadap konsekuensi yang merusak dari perubahan iklim. Misalnya seperti kenaikan permukaan air ke laut akan mengancam banglades dan pulau-pulau kecil disamudra pasifik sehubungan dengan hal itu, perubahan iklim merupakan tantangan untuk keadilan lingkungan dan kesehatan.

Pemilihan untuk tidak menggunakan teknologi sering menjadi lebih mahal, teknologi dengan energy efisien menurunkan ketidak seimbangan dalam jangka waktu pendek, tetapi akan meningkatkan masalah pemanasan global (pats and kovats,2002). Efek perubahan iklim akan tidak sama di semua tempat misalnya tidak semua populasi penduduk mengalami resiko banjir di daerah pantai. Banjir karena serangan badai telah mengancam 50 juta penduduk setiap tahun. Apabila permukaan air laut naik setinggi setengah meter maka angka ini dapat meningkat dua kalinya. hasil penelitian para ahli menunjukan bahwa glistier di Greenland telah mencair dalam waktu yang lebih singkat disbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini akan membahayakan bagi masyarakat yang tinggal didaerah pantai yang rendah sebagai contoh jika permukaan air laut naik setinggi satu meter, hal ini berdampak 1 % tanah dimesir; 6% tanah di Nederland; 17,5% tanah di banglades akan tertutupair, serta hanya 20% tanah di pulau marshall yang terletak di atas permukaan air. Efek lain terhadap kesehatan manusia tidak di distribusikan secara merata. efek pemanasan global terhadap lingkungan dan kesehatan tidak hanya karena distribusi yang tidak merata malainkan juga dari

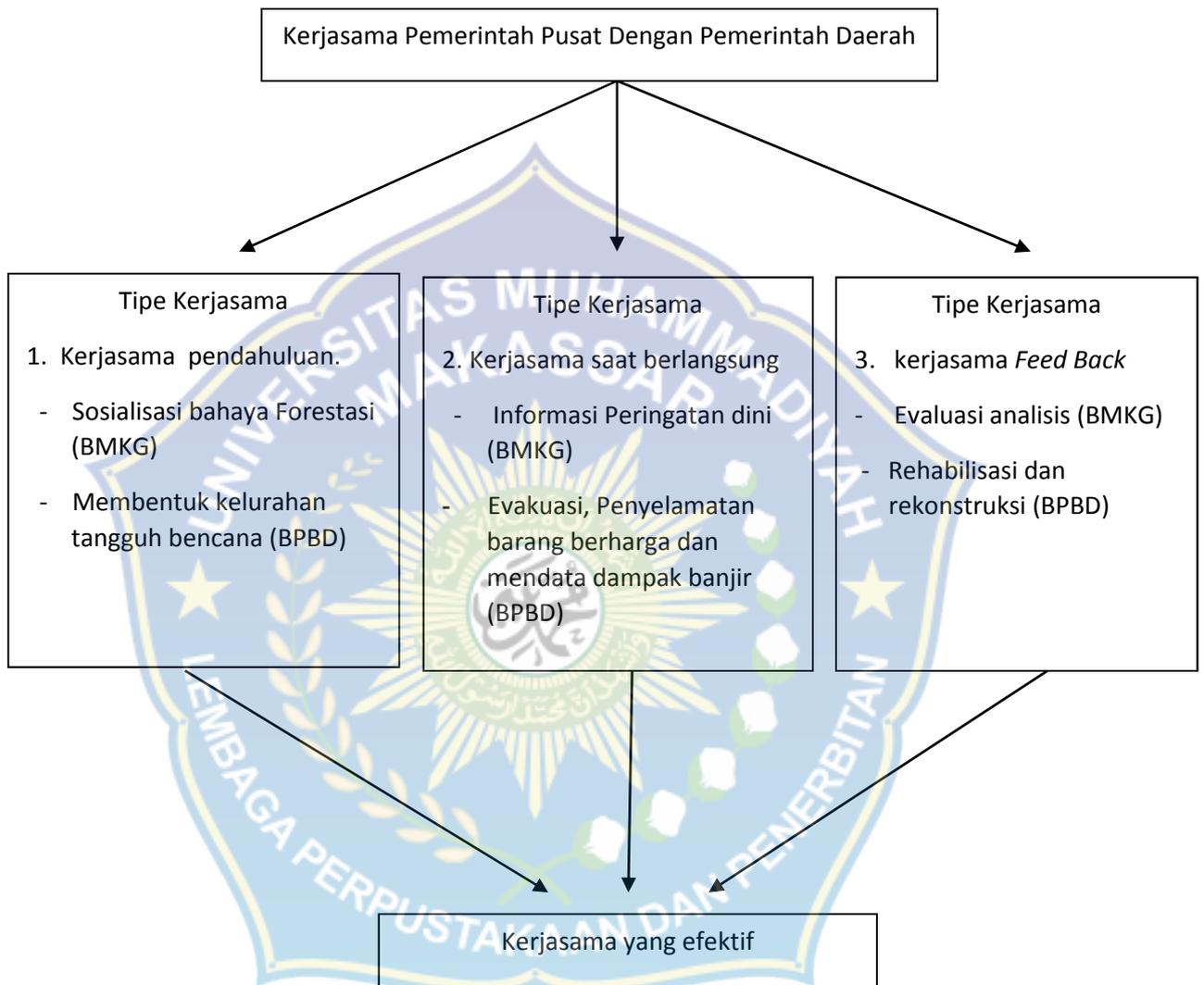
kemampuan masing-masing Negara yang terkena dampak untuk menangani perubahan tersebut.

### **E. Kerangka Pikir**

Perubahan iklim global merupakan salah satu isu lingkungan penting dunia dewasa ini, artinya tidak hanya di bicarakan di Indonesia tetapi juga di Negara lain di seluruh dunia.

Perubahan iklim di Kabupaten Bima dan Kota Bima merupakan fenomena alam yang sering terjadi diseluruh Indonesia termasuk wilayah kabupaten bima, perubahan iklim ini terjadi berdasarkan waktu pergantian musim seperti yang terjadi dikabupaten bima curah hujan tinggi akibat perubahan iklim menimbulkan dampak yang begitu besar berupa bencana alam yaitu banjir bandang tahun 2016 di kabupaten bima. Berdasarkan dampak akibat perubahan iklim yang terjadi pemerintahan pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan kerjasama yang serius terhadap cepatnya perubahan iklim yang terjadi di kabupaten bima selanjutnya proses kerjasama akan di jelaskan pada bagan kerangka pikir di bawah ini :

### Bagan kerangka pikir.



### F. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada persoalan kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penanggulangan dampak perubahan iklim di kota bima, selain itu dalam proses kerjasama pemerintah akan sama-sama

juga dengan masyarakat untuk melakukan penanggulangan terhadap dampak perubahan iklim yang terjadi di kota Bima.

### G. Deskripsi Fokus Penelitian

#### 1. kerjasama pemerintah

Kerjasama pemerintah adalah upaya memberikan keadilan terhadap masyarakat melalui kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.

#### 2. kerjasama pendahuluan (*preliminary cooperation*)

Kerjasama yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Kerjasama pendahuluan dalam hal ini adalah upaya menyiapkan dan memfasilitasi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi kedepannya, Memusatkan perhatian pada masalah pencegahan timbulnya deviasi-deviasi pada kualitas serta kuantitas sumber-sumber daya yang di gunakan pada organisasi-organisasi. Sumber daya ini harus memenuhi syarat-syarat pekerjaan yang ditetapkan oleh struktur organisasi yang bersangkutan.

#### 3. kerjasama pada saat kerja berlangsung (*coocurent conoperation*)

Kerjasama yang dilakukan ketika pekerjaan dilaksanakan, kerjasama pada saat kerja berlangsung yaitu upaya pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai mengayomi dan melayani masyarakat terhadap dampak dari suatu kejadian yang terjadi.

#### 4. kerjasama feed back (*feed back cooperation*)

Kerjasama feed back yaitu hasil suatu kegiatan yang telah di laksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak

sesuai dengan standar. Kerjasama yang di pusatkan pada kinerja organisasional di masa lalu. Tindakan korektif di tunjukan kearah proses pembelian sumber daya atau operasi-operasi aktual. Sifat khas dari metode-metode kerjasama feed back ( umpan balik) adalah bahwa di pusatkan pada perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang

#### 5. kerjasama yang efektif.

Kegiatan mengadakan koreksi. Pengukuran-pengukuran laporan dalam suatu kerjasama tidak akan berarti koreksi, jikalau dalam hal ini di ketahui bahwa aktivitas umum tidak ke hasil-hasil yang di inginkan.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa proses kerjasama yang dilakukan berdasarkan beberapa tahap yang harus dilakukan.

1. Menetapkan standar pelaksanaan (perencanaan) sehingga dalam melakukan kerjasama pemerintah mempunyai standar yang jelas.
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan  
Mengukur kinerja pegawai, sejauh mana pegawai dapat menerapkan perencanaan yang telah dibuat atau ditetapkan perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan secara optimal.
3. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standard an menganalisa penyimpangan\_ penyimpangan.
4. Mengambil tindakan koreksi melakukan perbaikan jika ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Bagian ini menjelaskan tentang tempat-tempat penelitian mulai dari pemilihan lokasi penelitian, data soal wawancara tipe dan dasar penelitian, teknik pengumpulan data dan analisa data yang akan membantu dalam kelangsungan penelitian ini.

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan mulai dari bulan desember sampai dengan february 2018. Lokasi penelitian dilakukan diwilayah kota bima nusa tenggara barat dengan alasan untuk mengetahui bagaimana Kerjasama Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan dampak perubahan iklim. Alasan lain dipilih sebagai tempat penelitian karena dianggap kurangnya kerjasama pemerintah dalam penanggulangan dampak perubahan iklim dikota bima sehingga menyebabkan banjir badang tahun 2016 lalu.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. jenis penelitian.**

“Penelitian yang menggunakan jenis metode kualitatif melakukan aktivitasnya untuk memperoleh pengetahuan, sejumlah informasi atau cerita yang rinci tentang subyek dan latar sosial penelitian. Pengetahuan atau informasi yang di peroleh dari hasil wawancara mendalam dan pengamatan tersebut akan berbentuk cerita yang sangat mendetail (deskripsi yang rinci, gambaran yang mendalam) termasuk ungkapan –

ungkapan asli subjek penelitian” (Hamidi,2004:3). Menurut sugiono metode kualitatif adalah “suatu metode penelitian kualitatif yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang di alami (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah instrumen kunci” (Sugiono,2005:3)

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami informan. Adapun masalah-masalah yang diteliti adalah mengenai kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penanggulangan dampak perubahan iklim di kota bima.

## C. Sumber Data

Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang di perlukan dalam penelitian ini maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

### 1. Data primer

Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini. Data ini bersifat mentah yang di analisis lebih lanjut. Untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah :

- Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan atau responden untuk memperoleh keterangan yang di

perlu. Adapun hasil wawancara ini merupakan suatu cara untuk memperoleh data primer.

- Observasi, yaitu mengadakan pengamatan dan wawancara terhadap objek secara langsung tentang bagaimana kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penanggulangan dampak perubahan iklim di Kota Bima

## 2. Data Sekunder

Yaitu data yang dikumpulkan melalui dokumen-dokumen mengenai bagaimana kerjasama Pemerintah pusat dengan pemerintah Daerah dalam penanggulangan dampak perubahan iklim di kota bima.

## **D. Informan Penelitian**

Informan merupakan orang-orang yang berpotensi dan berkelompok memberikan informasi tentang. Kerjasama Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Penanggalulungan Dampak Perubahan Iklim di Kota Bima

Beberapa tehnik penentuan informan obyek yang menjadi sumber penelitian dalam memeperoleh data.

1. Purposive, penelitian memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah di tetapkan.kriteria ini harus sesuai dengan topik penelitian, mereka yang dipihpun harus di anggap kredible untuk menjawab masalah penelitian.

2. Snowball atau bola salju, informan yang di pilih adalah hasil rekomendasi dari dari informan sebelumnya. Ini umumnya di gunakan bila peneliti tidak mengetahui dengan pasti orang-orang yang layak untuk menjadi sumber

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu BMKG Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geovisika stasium Muhammad salahuddin Bima, BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, Masyarakat Korban Banjir, yang berpotensi memberikan informasi tentang objek kajian dalam penelitian ini. Dalam rangka memberikan gambaran utuh tentang informan, maka berikut di gambarkan tabel informan dalam penelitian ini.

**Tabel.No.III.1 : Informan Penelitian**

No	Nama	Inisial	Jabatan	Ket
1	IR. H. SARAFUDDIN. MM	SF	Kepala badan penanggulangan bencana	1
2	DARYATNO, SP, MP	DY	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geovisika	1
3	JUMHARI	JH	Masyarakat (korban banjir)	1
4	SYAHRUDIN	SR	Masyarakat (korban banjir)	1
5	ABDUL HARIS	AH	Masyarakat (korban banjir)	1
	JUMLAH			5

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah

### **1. Observasi**

Observasi atau pengamatan langsung adalah metode atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat dan mengamati individu atau kelompok secara langsung, secara sederhana observasi dapat pula di pahami sebagai teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan langsung pancaindra.

Objek observasi atau pengamatan langsung dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi daerah pasca bencana dan pola pemerintah dalam melakukan penanggulangan dampak perubahan iklim seperti banjir bandang di Kota Bima.

### **2. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk di jawab secara lisan pada (J. Moleong) metode wawancara dapat pula di artikan dengan pertemuan dan orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna kedalam suatu topik tertentu.

Dalam penelitian ini wawancara di lakukan dengan pola wawancara mendalam (*indepth interviews*) dan sistematis, wawancara

mendalam dan sistematis adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman (*guide*) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden informan dalam hal ini Badan Meteorologi Klimatologi Geovisikam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima dan juga beberapa korban banjir.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah tahap selanjutnya untuk mengelolah data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Menurut Miles dan Huberman terdapat tiga aktivitas dalam analisis data, yaitu:

##### **1. Reduksi Data**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mencarinya bila diperlukan.

##### **2. Penyajian Data**

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data merupakan rakitan informasi dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya agar makna peristiwa lebih mudah dipahami.

##### **3. Penarikan Kesimpulan**

Dalam Penelitian kualitatif, penyajian data merupakan rakitan informasi dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,

flowchart, dan sejenisnya agar makna peristiwa lebih mudah dipahami, sehingga penarikan kesimpulan diambil dari informan.

### **G. Keabsahan Data**

Validasi data sangat mendukung hasil penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

Menurut Wiliam (dalam Sugiyono,2009;273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat trigulasi sumber, trigulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

#### **1. Triangulasi sumber.**

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

#### **2. Triangulasi Teknik.**

Triangulasi teknik bermakna data yang diperoleh di uji keakuratan dan ketidak akuratnya dengan menggunakan teknik tertentu.

#### **3. Triangulasi waktu**

Triangulasi dengan waktu yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, dan pada sore hari saat narasumber sudah merasa jenuh dan dipenuhi oleh banyak masalah.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Kota Bima

Bima atau yang disebut juga dengan Dana Mbojo telah mengalami perjalanan panjang dan jauh mengakar ke dalam Sejarah. Menurut Legenda sebagaimana termaksud dalam Kitab BO (Naskah Kuno Kerajaan dan Kesultanan Bima), kedatangan salah seorang musafir dan bangsawan Jawa bergelar Sang Bima di Pulau Satonda merupakan cikal bakal keturunan Raja-Raja Bima dan menjadi permulaan masa pembabakan Zaman pra Sejarah di tanah ini. Pada masa itu, wilayah Bima terbagi dalam kekuasaan pimpinan wilayah yang disebut Ncuhi. Nama para Ncuhi terilhami dari nama wilayah atau gugusan pegunungan yang dikuasainya.

Ada lima orang ncuhi yang tergabung dalam sebuah Federasi Ncuhi yaitu, Ncuhi Dara yang menguasai wilayah Bima bagian tengah atau di pusat Pemerintah. Ncuhi Parewa menguasai wilayah Bima bagian selatan, Ncuhi Padolo menguasai wilayah Bima bagian Barat, Ncuhi Banggapupa menguasai wilayah Bima bagian Timur, dan Ncuhi Dorowuni menguasai wilayah Utara. Federasi tersebut sepakat mengangkat Sang Bima sebagai pemimpin. Secara De Jure, Sang Bima menerima pengangkatan tersebut, tetapi secara de Facto ia menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Ncuhi Dara untuk memerintah atas namanya.

Pada perkembangan selanjutnya, putera Sang Bima yang bernama Indra Zamrud dan Indra Komala datang ke tanah Bima. Indra Zamrud lah yang menjadi Raja Bima pertama. Sejak saat itu Bima memasuki Zaman kerajaan. Pada perkembangan selanjutnya menjadi sebuah kerajaan besar yang sangat berpengaruh dalam percaturan sejarah dan budaya Nusantara. Secara turun temurun memerintah sebanyak 16 orang raja hingga akhir abad 16

Fajar islam bersinar terang di seluruh Persada Nusantara antara abad 16 hingga 17 Masehi. Pengaruhnya sangat luas hingga mencakar tanah Bima. Tanggal 5 Juli 1640 Masehi menjadi saksi dan tonggak sejarah peralihan sistem pemerintahan dari kerajaan kepada kesultanan. Ditandai dengan dinobatkannya Putera Mahkota La Ka'i yang bergelar Rumata Ma Bata Wadu menjadi Sultan Pertama dan berganti nama menjadi Sultan Abdul Kahir (kuburannya di bukit Dana Taraha sekarang). Sejak saat itu Bima memasuki peradaban kesultanan dan memerintah pula 15 orang sultan secara turun menurun hingga tahun 1951.

Masa kesultanan berlangsung lebih dari tiga abad lamanya. Sebagaimana ombak dilautan, kadang pasang dan kadang pula surut. Masa-masa kesultanan mengalami pasang dan surut disebabkan pengaruh imperialisme dan kolonialisme yang ada di Bumi Nusantara. Pada tahun 1951 tepat setelah wafatnya sultan ke-14 yaitu sultan Muhammad Salahudin, Bima memasuki Zaman kemerdekaan dan status Kesultanan Bima pun berganti dengan pembentukan Daerah Swapraja dan swatantra yang selanjutnya berubah menjadi daerah Kabupaten.

Pada tahun 2002 wajah Bima kembali di mekarkan sesuai amanat Undang-undang Nomor 13 tahun 2002 melauai pembentukan wilayah Kota Bima. Hingga sekarang daerah yang terhampar di ujung timur pulau sumbawa ini terbagi dalam dua wilayah administrasi dan politik yaitu Pemerintah kota Bima dan Kabupaten Bima. Kota Bima saat ini telah memiliki 5 kecamatan dan 38 kelurahan dengan luas wilayah 437.465 Ha dan jumlah penduduk 419.302 jiwa dengan kepadatan rata-rata 96 jiwa/Km<sup>2</sup>.

Sebagai sebuah daerah yang baru terbentuk, Kota Bima memiliki karakteristik perkembangan wilayah yaitu: pembangunan infrastruktur yang cepat, perkembangan sosial budaya yang dinamis, dan pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi, Sudah 13 tahun ini Kota Bima dipimpin oleh seorang Wali kota dengan peradaban Budaya Dou Mbojo yang sudah mengakar sejak jaman kerajaan hingga sekarang masih dapat terlihat dalam kehidupan masyarakat Kota Bima dalam kesehariannya. Baik sosial, Budaya dan Seni tradisional yang melekat pada kegiatan Upacara Adat, Prosesi Pernikahan, Khataman Qur'an, Khitanan dan lain-lain serta bukti-bukti sejarah Kerajaan dan Kesultanan masih juga dapat dilihat sebagai Situs, Kepurbakalaan dan bahkan menjadi Objek Daya Tarik Wisata yang ada di Kota Bima dan menjadi objek kunjungan bagi wisatawan lokal, nusantara bahkan mancanegara.

Suku asli masyarakat Kota Bima adalah suku Bima atau dikenal dalam bahasa lokal nya "Dou Mbojo". Salah satu ke-unikan Kota Bima adalah sebagian dari masyarakat nya juga berasal dari berbagai suku dan etnis

di Indonesia seperti; Jawa, Sunda, Timor, Flores, Bugis, Bajo, Madura, Sasak (Lombok), Bali, Minang dan Batak sehingga memberi warna tersendiri di dalam keseharian mereka di Kota Bima (suku-suku ini selalu memeriahkan upacara dan pawai pada hari-hari besar di Kota Bima) dengan hidup berdampingan secara rukun dan damai serta suasana kondusif.

Jumlah Penduduk Kota Bima berdasarkan data tahun 2000 tercatat sebesar 116.295 jiwa yang terdiri dari 57.108 jiwa (49%) penduduk laki-laki dan 59.187 jiwa (51%) penduduk perempuan. Sebaran penduduk kurang merata, konsentrasi penduduk berada di pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Penduduk terbanyak berada di Kelurahan Paruga, yaitu berjumlah 12.275 jiwa (11%) dan paling sedikit di Desa Kendo yang berjumlah 1.130 jiwa (1%). Selanjutnya berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, penduduk Kota Bima berjumlah 142.443 jiwa yang terdiri dari 69.841 jiwa laki-laki dan 72.602 jiwa perempuan. Jumlah penduduk menurut kecamatan adalah sebagai berikut : Kecamatan Raba 34.756 jiwa, Kecamatan Mpunda 32.531 jiwa, Kecamatan Rasanae Barat 31.029 jiwa, Kecamatan Asakota 27.931 jiwa, Kecamatan Rasanae Timur 16.196 jiwa.

Secara historis Kota Bima merupakan pusat Kesultanan Bima dimasa lampau. Dengan warisan kekayaan budaya yang dimiliki, Kota Bima dapat mengembangkan wisata budaya dengan kebudayaan Islam sebagai basisnya. Asi Mbojo (istana kesultanan), kuburan raja-raja dan para wali, permainan dan kesenian rakyat serta upacara keagamaan seperti perayaan

maulid, U'a pua serta prosesi pelantikan raja dan lain-lain merupakan objek dan *event* yang sangat menarik.

Sumber daya alam Kota Bima juga memiliki daya tarik tersendiri sebagai Objek Daya Tarik Wisata karena letak Kota Bima berada di bibir Teluk yang sangat indah yang menawarkan berbagai atraksi wisata laut dan pantai seperti; berenang, berperahu, memancing, bersantai, melihat kehidupan masyarakat nelayan serta menikmati makanan khas desa tradisional nelayan. Kawasan pesisir dari Pantai Lawata sampai pintu gerbang Kota Bima bisa dikembangkan sebagai pusat perhotelan dan perdagangan *souvenir*. Taman Kota juga bisa diciptakan sebagai alternatif bagi wisatawan domestik. Disisi lain alam dan hutan serta hamparan sawah yang luas juga dapat dilihat di Kota Bima.

## **2. Profil BMKG Stasiun Meteorologi Muhammad Salahudin Bima.**

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Badan Meteorologi, klimatologi, Dan Geovisika mempunyai status sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BMKG dikoordinasikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perhubungan.

a. Visi dan Misi Badan Meteorologi, klimatologi, Dan Geovisika

Dalam rangka mendukung dan mengemban tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan kewenangan BMKG agar lebih efektif dan efisien, maka diperlukan aparatur yang profesional, bertanggung jawab dan berwibawa serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), disamping itu harus dapat menjunjung tinggi kedisiplinan, kejujuran dan kebenaran guna ikut serta memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Oleh karena itu kebijakan yang akan dilakukan BMKG Tahun 2010-2014 adalah mengacu pada Visi, Misi, dan Tujuan BMKG yang telah ditetapkan.

Visi BMKG adalah mewujudkan BMKG yang handal, tanggap dan mampu dalam rangka mendukung keselamatan masyarakat serta keberhasilan pembangunan nasional, dan berperan aktif di tingkat Internasional. Terminologi di dalam visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

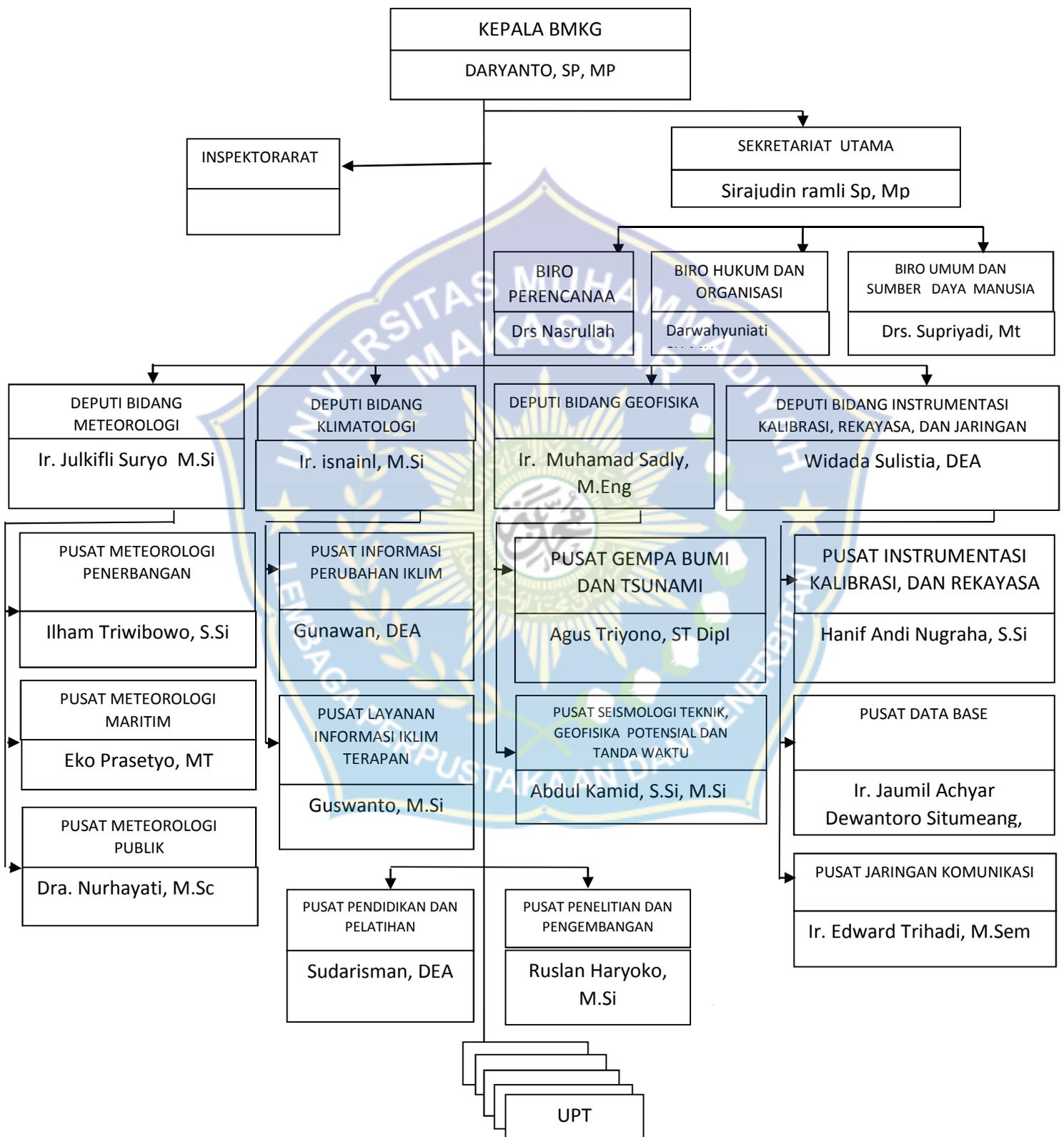
- a. Pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika yang handal ialah pelayanan BMKG terhadap penyajian data, informasi pelayanan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika yang akurat, tepat sasaran, tepat guna, cepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan

b. Tanggap dan mampu dimaksudkan BMKG dapat menangkap dan merumuskan kebutuhan stakeholder akan data, informasi, dan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika serta mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa;

Misi BMKG adalah mewujudkan Visi BMKG, maka diperlukan visi yang jelas yaitu berupa langkah-langkah BMKG untuk mewujudkan Misi yang telah ditetapkan yaitu :

- a. Mengamati dan memahami fenomena meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika.
- b. Menyediakan data, informasi dan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika yang handal dan terpercaya.
- c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika.
- d. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan internasional di Bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika.

a. Stuktur Organisasi Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geovisika (BMKG) Stasiun Muhammad Salahudin Bima.



### 3. Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima.

#### a. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, Kesiapsiagaan, tanggap darurat, Logistik, rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat dan berdaya. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.

b. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima adalah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang paling muda di Kota Bima mempunyai Visi yaitu : **"Terwujudnya Kota Bima Yang Aman, Nyaman Dan Mandiri Melalui Penanganan Bencana Yang Tanggap, Cepat Dan Tepat"**.

1. Nyaman adalah terwujudnya kondisi Kota Bima yang dapat memberikan rasa nyaman bagi warga.
2. Mandiri adalah terwujudnya kesadaran masyarakat yang memiliki kemandirian dalam mengantisipasi dan menangani kondisi yang dapat mengganggu "keamanan dan kenyamanan" kehidupan.

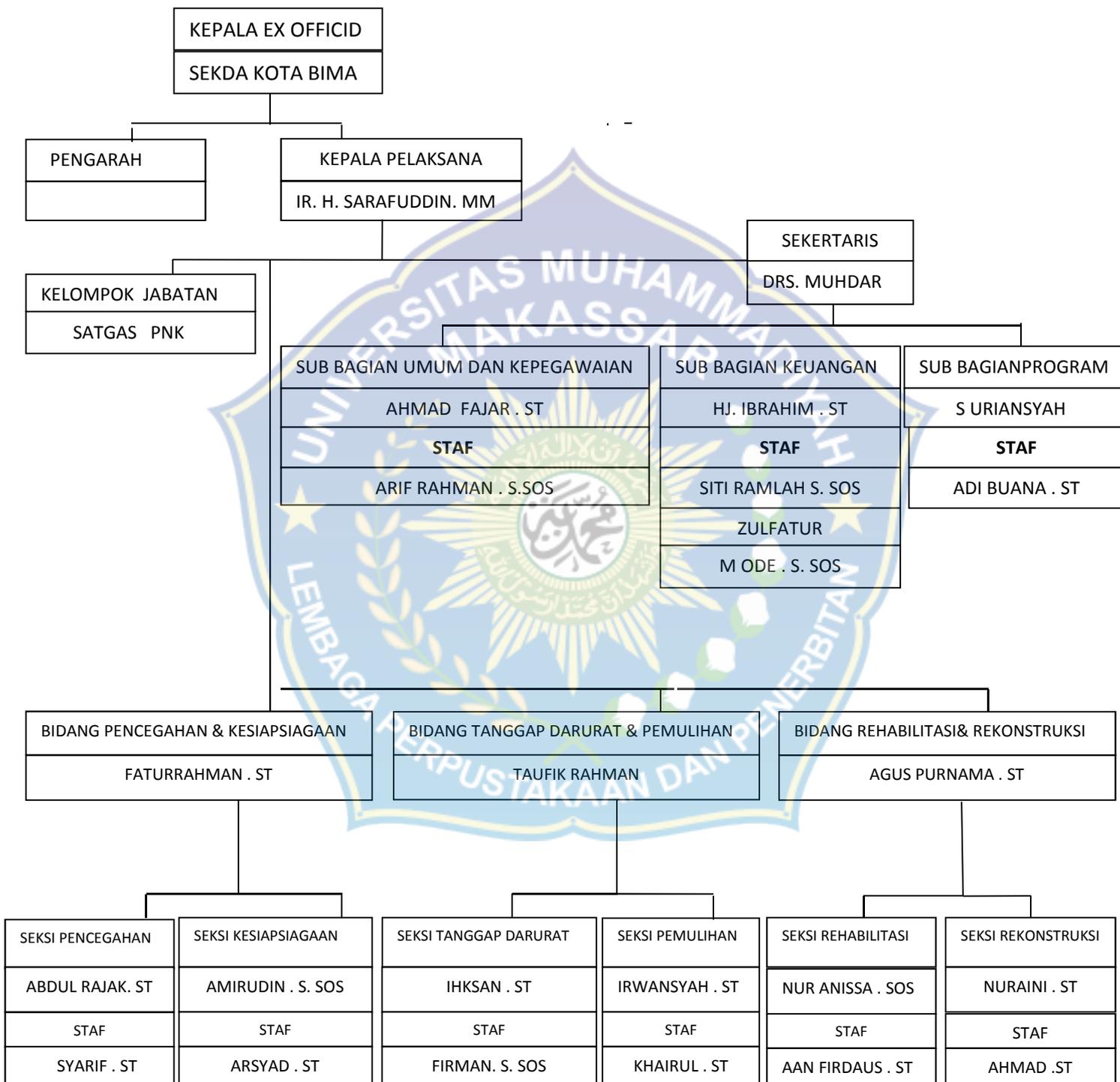
c. Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Adalah Sebagai

Berikut :

1. Melaksanakan Peningkatan Kapasitas BPBD dan SDM.
2. Meningkatkan Koordinasi dalam Penanganan Bencana dengan Instansi terkait.
3. Melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran aktif Masyarakat dalam Penanganan Bencana.
4. Meningkatkan upaya-upaya Penanganan bencana baik pada Kondisi sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana dan Pasca bencana.



d. Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima.



**B. Analisis Perubahan Iklim BMKG Stasiun Muhammad Salahuddin Bima.**

**Tabel. No IV .2. : Data Analisis Meteorologi**

No	Indikator	Keterangan
1	Suhu Muka Laut	a. Data model analisis SST tanggal 21 Desember 2016 menunjukkan bahwa suhu muka laut di wilayah perairan pulau sumbawa cukup hangat berkisar 30-32 c. kondisi ini menunjukkan adanya pasokan uap air yang cukup ke wilayah pulau sumbawa untuk pembentukan awan.
2	Pola Tekanan	<p>a. Data analisis medan tekanan 20 desember 2016 menunjukkan adanya dua tekanan rendah di samudra hindia sebelah selatan bali dan nusa tenggara timur. Pengaruh dua tekanan rendah.</p> <p>b. Data analisis medan tekanan tanggal 22 desember 2016 terlihat adanya siklon tropis ‘ YVETTE’ samudra Hindia sebelah selatan bali dan siklon tropis ‘nock-ten’ samudra pasifik sebelah utara jayapura.</p> <p>c. Analisis medan tekanan tanggal 23 desember 2016 terlihat bahwa siklon tropis ‘YVETTE’ di samudra hindia selatan bali sudah punah dan menjadi tekanan rendah 993 mb yang berpusat di selatan pulau sumbawa.</p>
3	Pola Angin	a. Berdasarkan analisis angin gradien tanggal 20 desember 2016 jam 12.00 utc menunjukkan adanya perlambatan angina (konvergensi) dan belokan angina (shearline) di

		<p>pulau sumbawa akibat dari pengaruh dua tekanan rendah di samudra Hindia. Perlambatan dan belokan angin tersebut berpotensi terhadap pertumbuhan awan hujan.</p> <p>b. Berdasarkan analisis angin gradient tanggal 22 desember 2016 jam 12 utc terlihat adanya siklon Tropis 'YVETTE' dan tekanan rendah di utara Australia yang mengakibatkan perlambatan angin (konvergensi) di pulau sumbawa. Kondisi tersebut berpotensi pertumbuhan awan. Analisis angin gradient tanggal 23 desember 2016 terlihat tekanan rendah di selatan sumbawa, mengakibatkan pertemuan dan belokan angin di pulau sumbawa khususnya kota bima.</p>
4	Kelembapan Relatif	<p>a. Berdasarkan data kelembapan udara tgl 20 desember 2016 lapisan 850mb bernilai 80-90% lapisan 700mb bernilai 70-80%. Kelembapan udara tanggal 21 Desember 2016 pada lapisan 850mb berkisar antara 70-80%, lapisan 700mb 70-80%</p> <p>b. Kelembapan udara tanggal 22 desember 2016 pada lapisan 850mb bernilai 80-90% lapisan 700mb 70-80%</p> <p>c. Kelembapan udara tanggal 23 desember 2016 pada lapisan 850mb berkisar antara 70-80%, lapisan 700mb berkisar antara 80-90%</p> <p>d. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi udara pada tanggal 20</p>

		sampai 23 desember cukup basah, dan sangat berpotensi untuk pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut.
5	Citra satelit cuaca	<p>a. Analisis citra satelit himawari di wilayah pulau sumbawa tanggal 20 Desember 2016 menunjukkan bahwa pada pukul 23.10 utc ( 07.10 Wita tanggal 21 desember) terlihat adanya pertumbuhan awan cb di wilayah barat laut kota bima, dengan arah pergerakan awan ke arah tenggara. Pada pukul 01.30 UTC (09.30 Wita) Awan cb hampir menutupi seluruh kabupaten bima, dompu dan kota bima, pada pukul 03,00 UTC Awan Cb menutupi wilayah kabupaten bima, dompu, dan kota bima, pukul 04, 40 UTC Menutupi wilayah pulau sumbawa.</p> <p>b. Analisis citra satelit tanggal 23 desember 2016 di wilayah pulau sumbawa khususna kota bima terlihat adanya pertumbuhan awan dari arah barat laut bergerak menuju kota bima pada pukul 01.10 utc ( 09.10 wita). Pukul 02.00 utc (10.00 Wita) pertumbuhan awan Cb sudah mencapai kota bima. Pukul 03.50 UTC (11.50Wita) awan cb menutupi seluruh kabupaten dan kota bima. Kondisi tersebut berlangsung hingga pukul 14.10 UTC (22.10 Wita).</p>
6	Citra Radar	a. Analisis citra radar tanggal 20 Desember 2016 pukul 08.10 UTC (16.10 Wita) Terlihat pertumbuhan awan dari barat

		<p>Laut tepatnya di kecamatan sromandi. Pukul 08.30 UTC (16.30 wita) terlihat awan cb dan terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah kecamatan asakota, raba, mpunda, rasanae barat, timur, kondisi ini berakhir pada pukul 09.00 utc (17.00 Wita).</p>
		<p>b. Perumbuhan awan kembali muncul dari arah barat laut di kecamatan kilo pada pukul 20.50 utc (04.50 tgl 21 Desember 2016) Menuju kearah kota bima. Pada pukul 21.10 UTC (05.10 Wita tgl 21 Desember 2016) pergerakan awan sudah mencapai kota bima (kecamatan asakota, rasanae barat, timur, mpunda dan raba). Pergerakan awan kea rah tenggara menuju kecamatan wawo, sape dan lambu. Kondisi tersebut berlangsung hingga pukul 13.40 UTC (21,40 Wita)</p>
		<p>c. Dari analisis akumulasi curah hujan terlihat adanya peringatan peningkatan curah hujan di wilayah kota bima pada tanggal 21 desember 2016 pukul 05.10 UTC (12.10 wita). Peningkatan curah hujan ini berdasarkan kondisi hujan yang secara terus menerus dengan intensitas sedang-lebat sejak dini hari tanggal 21 desember 2016. Peringatan tersebut meluas hingga pukul 08.00 wita (16.00 wita) di kota bima dan kecamatan wawo, tepat pada saat terjadinya banjir bandang dikota bima.</p>

		<p>d. Berdasarkan citra Radar cuaca bima pada tanggal 23 Desember 2016 Terlihat adanya pertumbuhan awan konvektif ( indikasi pembentukan awan cumulonimbus) di wilayah kecamatan soromandi dan teluk bima yang berpotensi menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan di sertai dengan angin kencang dan petir, kumpulan awan konvektif ini tumbuh mulai dari pukul 09.20 wita dan meluas ke wilayah asa kota, Raba, dan rasanae barat pada pukul 11.30 wita.setelah itu kembali meluas kewilayah wawo dan sape pada pukul 12.50 wita dan pada jam jam berikutnya kumpulan awan cumulonimbus ( cb) mulai purnah. Berdasarkan hasil produk akumulasi hujan dari radar cuaca bima menunjukan adanya peringatan (warning) pada pukul 12.30 Wita sebagai akibat dari hujan lebat yang berkelanjutan dan mengalami puncak pada pukul 13.30 Wita dengan nilai curah hujan 25-50 mm.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : BMKG, Desember, 2017

**Tabel.No.IV.3. : Data Informasi Peringatan Dini**

No	Waktu	Isi Peringatan Dini
1	20 Desember 2016  16.20 Wita	Peringatan dini cuaca bima tanggal 20 desember 2016 pukul 16.20 Wita potensi terjadi hujan lebat di sertai petir pada pukul 16.25 wita di wilayah kecamatan woja, Hujan sedang di kecamatan soromandi. Kondisi ini di kecamatan asakota, rasanae barat .
2	21 Desember 2016  04.50 Wita	Peringatan Dini Cuaca Bima tgl 21 Desember 2016 pukul 04.50 Wita Potensi terjadi hujan sedang yang di sertai petir pada pukul 05.00 WITA di wilayah kilo Kondisi ini di perkirakan berlangsung hingga pukul 07.00 wita dan meluas kewilayah raba, Mpuda, rasanae barat, timur, Asakota.
3	21 Desember 2016  08.40 Wita	Peringatan Dini Cuaca Bima tgl 21 Desember pukul 08.40 Wita potensi terjadi hujan sedang pada pukul 08.50 Wita di wilayah kecamatan asakota, Raba, Kondisi ini berlangsung hingga pukul 10.30 Wita dan meluas kewilayah ambalawi Wera.
4	21 Desember 2016  10.10 Wita	Peringatan Dini Cuaca Bima tgl 21 Desember 2016 pukul 10.00 wita potensi terjadi hujan Sedang pada pukul 10.10 Wita potensi terjadi hujan sedang pada pukul 10.00 wita di wilayah kecamatan donggo, soromandi, asakota, raba,

		rasanae barat, timur, mpunda. Kondisi ini berlangsung hingga pukul 12.00 Wita dan meluas ke wilayah ambalawi, wera, wawo, sape.
5	21 Desember 2016 11.30 Wita	Peringatan Dini Cuaca Bima tanggal 21 Desember 2016 pukul 11.30 Wita potensi terjadi hujan sedang pada pukul 11.30 Wita di wilayah kecamatan donggo, soromandi, asakota, raba, rasanae barat, timur, mpunda, ambalawi, wera, wawo, sape, Kondisi ini berlangsung hingga pukul 14.00 Wita dan meluas ke wilayah kecamatan langgudu.
6	21 Desember 2016 15.00 Wita	Peringatan Dini Cuaca Bima tgl 21 Desember 2016 pukul 15.00 Wita Potensi terjadi hujan sedang pada pukul 15.00 di wilayah kecamatan donggo, soromandi, Bolo, asakota, raba, rasanae barat, timur, mpunda, ambalawi, wera, wawo, sape. Kondisi ini berlangsung Hingga pukul 17.00 Wita dan Meluas ke wilayah kecamatan langgudu.
7	23. Desember 2016 09.29 Wita	Peringatan dini cuaca NTB tanggal 23 Desember 2016 pukul 09.20 Wita potensi terjadi hujan sedang pada pukul 09.30 Wita di wilayah kecamatan kilo, soromandi, Donggo, asakota, raba, rasanae barat, rasanae timur, mpunda, wawo, lambitu, palibelo, belo. Kondisi ini berlangsung hingga pukul 11.30 Wita dan meluas ke wilayah langgudu, sape, lambu.
8	23 Desember 2016	Peringatan Dini Cuaca NTB tanggal 23 Desember 2016

	11.20 Wita	pukul 11.20 wita berpotensi terjadi hujan sedang-lebat disertai petir pada pukul 11.20 wita di wilayah kecamatan soromandi, asakota, rasanae barat, asakota, raba. Kondisi ini di perkirakan berlangsung hingga pukul 13.00 wita dan meluas ke wilayah kecamatan wawo dan sape.
9	23 Desember 2016  13.00 Wita	Peringatan Dini Cuaca NTB tanggal 23 Desember 2016  pukul 13.00 wita masih berpotensi terjadi hujan sedang-lebat di sertai petir pada pukul 13.10 wita di wilayah ambalawi, wawo Sape, Asakota, Raba, Rasanae Barat Rasanae Timur, Mpunda. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 16.00 wita dan meluas ke wilayah kecamatan langgudu.

Sumber : BMKG, Desember, 2017.

**Tabel.No.IV.4. : Data Curah Hujan**

No	Pos Hujan	Curah Hujan Terukur (mm) 20 Des 2016	Curah Hujan Terukur (mm) 21 Des 2016	Curah Hujan Terukur (mm) 22 Des 2016	Curah Hujan Terukur (mm) 23 Des 2016	Keterangan
1	Kel. Kolo	116	105	40	208	Sangat Lebat 20,21 dan 23 Desember 2016
2	Kec. Asakota	98	104	2	163	Sangat Lebat 20,21 dan 23 Desember 2016
3	Kec. Raba	23	101	29	129	Hujan sangat lebat pada tanggal 21 dan 23 desember 2016
4	Kec. Rasanae Timur	-	124	13	107	Sangat lebat tanggal 21 dan 23 desember 2016
5	Kec. Wawo	15	111	55	35	Sangat lebat tanggal 21 desember 2016
6	Kec. Sape	95	22	83	1	Lebat tanggal 20 dan 23 desember 2016

Sumber : BMKG, Desember, 2017.

### C. Data Tabel Terdampak Banjir Kota Bima.

**Tabel.No.IV.5. : Data Penduduk Dampak Banjir.**

No	Kecamatan	Jiwa	Kk	%Terdampak	Penduduk Terdampak	Ketinggian Genangan
1	Kec. Rasanae Timur	18,155	4,166	95 %	3,581	1 - 2,5 M
2	Kec. Mpuda	36,406	9,350	775 %	30,078	0,5 – 3 M
3	Kec. Raba	39,038	9,790	505 %	19,955	0,5 – 2,5
4	Kec. Rasanae Barat	34,871	9,091	580 %	33,492	1 – 3 M
5	Kec. Asakota	31,263	6,789	220 %	18,648	1 – 3 M
	Total	159,736	39,187	2175	105,753	0,5 – 3 M

Sumber : BPBD Kota Bima,2017.

**Tabel.No.IV.6. : Data Rumah Penduduk Dampak Banjir**

No	Kecamatan	Terdampak	Hanyut	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Kk Terendam
1	Kec. Rasanae Timur	4,116		19	8	31	-
2	Kec. Mpunda	9,350	49	48	63	212	-
3	Kec Raba	9,790	24	64	87	8	83
4	Kec. Rasanae Barat	9,091	30	54	145	638	1014
5	Kec. Asakota	6,790	7	19	58	524	-
	Total	39,137	110	204	361	1413	1097

Sumber : BPBD Kota Bima,2017

**Tabel.No.IV.7. : Data Infrastruktur Terdampak Banjir**

No	Fasilitas	Kerusakan	Perkiraan Kerugian	Ket
1	Jembatan Gantung	Putus	3 Milyar	
2	Jembatan Padolo 2	Retak/Miring	10 Milyar	
3	Jembatan Padolo 1	Retak	35 Milyar	
4	Jembatan Kodo 1	Putus	20 Milyar	
5	Jembatan Gajah	Rusak Berat	15 Milyar	
6	Jembatan Sambu Nae	Bergeser	25 Milyar	
7	Jembatan Toloweri 1	Bergeser Struktur	30 Milyar	
8	Jembatan Dodu 1	Bergeser Struktur	7 Milyar	
9	Jalan Kota 40 Km	Rusak Berat	80 Milyar	
10	Drainase Dalam Kota	80% Tertutup Lumpur	10 Milyar	
11	Prasarana Air Minum	Intek Rusak Berat	5 Milyar	
12	Sarana Persampahan	Rusak Dan Hilang	5 Milyar	
13	DAM Toloweri	Rusak Berat	1 Milyar	
14	DAM Nungga	Rusak Sedang	0,5 Milyar	
15	DAM Mbolo Dodu	Rusak Berat	0,75 Milyar	
16	DAM Dadi Kodo	Rusak Berat	0,5 Milyar	
17	DAM Mboda Kodo	Rusak Berat	0,5 Milyar	
	<b>Total</b>		258,75 Milyar	

Sumber : BPBD, Kota Bima, 2017.

## **D. Kerjasama Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim di Kota Bima.**

### **1. Kerjasama Pendahuluan**

Kerjasama pendahuluan adalah kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (BMKG) dengan Pemerintah daerah (BPBD) sebelum kejadian berlangsung, kerjasama pendahuluan yang dimaksud adalah bagaimana upaya pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam melakukan serangkaian proses penanggulangan awal dari dampak perubahan iklim seperti bencana banjir dan lain-lain. Adapun beberapa cara yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan penanggulangan dampak perubahan iklim di Kota Bima yaitu :

#### **1.a. Sosialisasi Bahaya Deforestasi.**

Sosialisasi bahaya deforestasi adalah upaya pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana bahayanya penebangan pohon secara berlebihan, dikarenakan proses perubahan iklim yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor termasuk penebangan pohon secara berlebihan. Berikut wawancara dengan pihak pemerintah pusat yaitu pihak BMKG Stasiun Muhammad Salahudin Bima terkait bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BMKG kepada masyarakat.

Beliau mengatakan bahwa :

Sesuai dengan misi kami yaitu Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika. Kami dari pihak BMKG bekerjasama dengan pemerintah Kota Bima melakukan sosialisasi terkait bahaya deforestasi (penebangan

kayu di hutan hulu) perubahan iklim yang tidak menentu seperti saat ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu urbanisasi dan termaksud penebangan pohon secara berlebihan, kami melakukan sosialisasi setiap kecamatan yaitu dua kali satu minggu di daerah hulu, kami berkomitmen dengan tujuan supaya masyarakat lebih memahami akibat dari penggundulan hutan yang berlebihan itu akan terjadi perubahan iklim dan bergesernya musim dan menyebabkan intensitas hujan yang cukup tinggi,  
(Wawancara, DY Desember 2017)

Dari hasil wawancara diatas Penulis dapat menyimpulkan bahwa kerjasama pendahuluan oleh Pemerintah Pusat yaitu pihak (BMKG), dengan melakukan sosialisasi bahaya deforestasi sangat efektif karena perubahan iklim seperti saat ini yang menyebabkan Pengumpulan awan colibus tersebut dan akan terjadinya intensitas hujan yang tinggi tidak terlepas dari ulah manusia yang melakukan penggundulan hutan secara berlebihan.

b. Membentuk Kelurahan Tangguh Bencana.

Membentuk kelurahan tangguh bencana adalah upaya pemerintah dalam meyakinkan setiap kelurahan agar memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak dampak bencana yang merugikan. Berikut hasil wawancara dengan Kepala (BPBD) dengan mengemukakan hal yang sama dengan informan sebelumnya terkait bagaimana Kerjasama Pendahuluan dengan membentuk kelurahan tangguh bencana yang di lakukan oleh pemerintah Kota Bima

Beliau Menyatakan Bahwa :

“kerjasama pendahuluan yang kami lakukan selaku pemerintah kota bima dalam hal ini BPBD merupakan bentuk peninjauan awal

terhadap lokasi-lokasi daerah rawan bencana sehingga kami dapat membentuk kelurahan tangguh bencana yang dimana dilaksanakan di sebagian besar kelurahan yang belum mengembangkan atau memiliki komponen dasar kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, komponen dasar yang dimaksud antara lain berupa kajian dan peta resiko, penyusunan rencana penanggulangan bencana dan rencana aksi komunitas untuk pengurangan resiko dengan tujuan mendorong terwujudnya masyarakat desa/kelurahan tangguh dalam menghadapi bencana yang lebih terarah, terencana, terpadu dan terkoordinasi, pelaksanaan pertemuan secara berurutan dengan fasilitas formal dilakukan sebanyak dua puluh kali pertemuan.  
( wawancara, Sf, 7 desember 2017 )

Berikut table pertemuan yang dilakukan BPBD dengan pembentukan kelurahan tangguh bencana :

**Tabel.No.IV.8. : pertemuan kelurahan tangguh bencana.**

No	Tema Bahasan	Hasil
1	Pengenalan Program dan Profil desa/kelurahan	Kesepakatan kerjasama, kesamaan pemahaman desa/kelurahan, dan penilaian baseline ketangguhan desa/kelurahan
2	Penyusunan kajian dan peta resiko bencana	Kajian dan peta ancaman, kerentanan, kapasitas dan risiko
3	Penguatan forum desa/kelurahan untuk PRB dan pembangunan	Bagan organisasi forum didesa/kelurahan serta tugas dan tanggung jawabnya
4	Pengembangan system peringatan dini dimasyarakat	Skema sistim Peringatan dini Peta dan strategi evakuasi
5	Penyusunan rencana evakuasi	Peta dan strategi evakuasi
6	Penyusunan rencana kontigensi	Dokumen rencana kontigensi desa
7	Sosialisasi peta risiko, rencana kontigensi, jalur evakuasi kepada masyarakat umum	Masyarakat mengetahui risiko di desa/kelurahan dan bagaimana responya
8	Simulasi evakuasi dan sistim peringatan dini	Rencana simulasi untuk menguji system peringatan dini, rencana evakuasi dan rencana kontigensi
9	Evaluasi proses dan keluaran program desa/kelurahan tangguh bencana	Pembelajaran yang baik dan tidak dari proses pelaksanaan program serta hasil penilaian <i>endline</i> ketangguhan desa/kelurahan.

Sumber : BPBD Kota Bima.2017

Dari hasil data dan wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kerjasama pendahuluan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima dengan membentuk kelurahan tangguh bencana sangat epektif karena membangun kesadaran masyarakat supaya terlibat aktif dalam melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap dampak perubahan iklim di kota bima, karena bencana adalah urusan bersama, dan dengan adanya kelurahan tangguh bencana masyarakat bisa mengetahui cara menghadapi bencana dengan terarah, terencana dan terkoordinasi.

Penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat korban banjir yang ada di kelurahan kobi dengan mengemukakan hal yang sama dengan informan sebelumnya terkait bagaimana kerjasama Pendahuluan yang di lakukan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal sosialisasi forestrasi dan pembentukan kelurahan tangguh bencana dalam penanggulangan dampak perubahan iklim di Kota Bima.

Beliau menyatakan bahwa :

“sebagai salah satu dari korban banjir di tahun 2016 saya menganggap kerjasama pendahuluan yang di lakukan oleh pemerintah terhadap dampak perubahan iklim di kota bima secara keseluruhan menganggap cukup baik di lihat dari tetap berjalanya program program yang di jalankan oleh pemerintah mengenai antisipasi terhadap bencana yang akan terjadi kedepanya, dengan adanya sosialisasi tersebut dan kelurahan tangguh bencana membuat kami sebagai masyarakat sedikit mengerti proses terjadinya bencana dan cara menghadapi bencana dengan terencana dan terarah.  
(wawancara, JH 23 desember 2017

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kerjasama pendahuluan yang di lakukan oleh pemerintah pusat dengan

pemerintah daerah Kota Bima dalam hal ini sosialisasi bahaya forestrasi menurut masyarakat korban banjir 2016 terbilang efektif karena kekonsistennya dalam menjalankan program antisipasi bencana tetap berjalan, masyarakat yang belum paham mengenai penyebab terjadinya bencana sebagian besar sudah mengetahui karena adanya sosialisasi bahaya forestrasi dan kelurahan tangguh bencana sebagai program pemerintah.

## **2. Kerjasama pada saat kerja berlangsung (*coccurrent cooperation*)**

Kerjasama pada saat kerja berlangsung adalah kerjasama yang bertindak atas arahan atasan pihak terkait pada saat kejadian atau kegiatan berlangsung guna memastikan bahwa penyuaian tindakan sesuai dengan keadaan yang berlangsung dengan tujuan dan sasaran – sasaran yang mungkin di capai. adapun beberapa cara yang dilakukan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam melakukan penanggulangan dampak bencana dalam hal ini kerjasama saat kerja berlangsung :

### **2. a. Informasi Peringatan Dini.**

Informasi peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Berikut hasil wawancara bersama kepala BMKG kota bima dengan mengemukakan hal yang sama dengan informan sebelumnya terkait bagaimana kerjasama pada saat kerja berlangsung (*coccurrent cooperation*) yang di lakukan pemerintah terhadap penanggulangan dampak perubahan iklim di kota bima.

“Kami selaku pihak BMKG mengeluarkan apa yang menjadi hasil analisis kami yang berstatus peringatan dini kepada pihak BPBD

agar tetap bersiap siaga dan melakukan serangkaian kegiatan tanggap darurat bila berkemungkinan terjadinya banjir karena disebabkan curah hujan yang berintensitas tinggi, kemudian kami dari pihak BMKG mengeluarkan informasi kepada masyarakat bahwa status hari ini akan terjadi hujan lebat disertai petir yang terjadi dua sampai empat hari kedepan lewat media sosial facebook atau situs resmi kami BMKG.

(Wawancara, DY, 10 Desember 2017).

Berikut table isi peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG pada saat kerja berlangsung guna melakukan penanggulangan dampak perubahan iklim dikota bima :

**Tabel.No.IV.9. : Isi Peringatan Dini**

Waktu	Isi peringatan dini
20 desember 2016	a. Potensi terjadi hujan lebat di sertai petir pada pukul 16.20 wita.
21 Desember 2016	a. potensi terjadi hujan sedang di sertai petir pada pukul 05.00 wita. b. potensi terjadi hujan sedang yang disertai petir pada pukul 11.30 wita. c. potensi terjadi hujan sedang pada pukul 15.00 wita.
23 Desember 2016	a. potensi terjadi hujan sedang pada pukul 09.20 wita b. potensi terjadi hujan sedang pada pukul 15.00 wita. c. potensi terjadi hujan sedang-lebat di sertai petir pada pukul 11.20 wita d. potensi terjadi hujan sedang-lebat disertai petir pada pukul 13.10 wita.

Sumber : BMKG,Desember,2017.

Dari hasil data dan wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kerjasama pada saat kerja berlangsung (*coccurrent cooperation*) yang di lakukan oleh pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geovisika (BMKG) dalam hal memberikan informasi peringatan dini terbilang evaktif karena dengan informasi peringatan dini hasil analisis tersebut Pihak Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tetap menyiapkan diri guna membantu masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi rawan bencana, dan hal yang sama juga bisa disarakan oleh masyarakat, masyarakat sedikit terbantu dengan informasi yang dikeluarkan oleh pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geovisika (BMKG) guna mempersiapkan diri akan kemungkinan yang terjadi kedepanya.

b. Tanggap darurat dan Logistik

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sesegara pada saat saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang menyeliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi serta pemberian makanan kepada korban dari dampak perubahan iklim. Berikut hasil wawancara dengan pihak BPBD terkait bagaimana kerjasama pada saat kerja berlangsung dengan mengemukakan hal yang sama dengan informan sebelumnya terkait bagaimana kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penanggulangan dampak perubahan iklim di kota bima,

Beliau menyatakan :

“Kami selaku pihak BPBD bekerja sama dengan beberapa dinas terkait yang berada di beberapa kota termasuk yang ada di Mataram guna mengevakuasi korban banjir dan melakukan penyelamatan barang-barang berharga yang di miliki warga korban banjir selain itu kami menyiapkan tenda sederhana dan memberikan makanan kepada korban banjir, Kami berupaya keras memberikan yang terbaik kepada masyarakat korban banjir dengan memberikan ketenangan kepada masyarakat supaya tidak panik dalam hal menghadapi banjir tersebut.

( wawancara, SF, 7 desember 2017 )

Berikut data dari dampak banjir di tahun 2016 yang menyebabkan kerugian yang cukup banyak oleh masyarakat maupun pemerintah itu sendiri:

**Tabel.No.IV.10. : Data Terdampak Banjir**

No	Terdampak	Total keseluruhan
1	Penduduk	159,733 jiwa
2	Rumah penduduk	39,137 rumah
3	Infrastruktur	258,75 milyar

Sumber : BPBD Kota Bima

Dari hasil data dan wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kerjasama yang di lakukan pemerintah dalam hal tanggap darurat terbilang cukup baik di lihat dari tidak adanya korban jiwa dari musibah banjir tersebut dan pemerintah sudah berupaya sekuat tenaga guna memberikan keringanan kepada masyarakat saat kejadian berlangsung tetapi berdasarkan data kerugian yang terlihat pemerintah harus berupaya lebih keras dalam hal mengawasi dan mengevaluasi lebih dalam terhadap dampak dari perubahan iklim tersebut.

Penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat korban banjir dengan mengemukakan hal yang sama dengan informan sebelumnya terkait bagaimana kerjasama saat kerja berlangsung yang di lakukan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terhadap dampak perubahan iklim di kota bima. Beliau menyatakan bahwa :

“Sebagai masyarakat korban banjir ditahun 2016 saya menganggap bahwa kerjasama yang dilakukan pemerintah dalam hal kerjasama saat kerja berlangsung yaitu peringatan dini dan tanggap darurat sudah cukup baik karena saya melihat bahwa bencana adalah hukum alam yang tidak bisa di hindarkan tetapi saya menilai bahwa bentuk

kerja keras dari pemerintah tersebutlah sehingga saya beranggapan kerjasama pemerintah ini sudah cukup baik.  
(Wawancara, SR, 23 Desember 2017 )

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa anggapan masyarakat korban banjir pemerintah dapat bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut, kerjasama saat kerja berlangsung dalam hal informasi peringatan dini dan tanggap darurat menurut masyarakat korban banjir sangat efektif di lihat dari cara kerja yang cepat dan tepat oleh pemerintah, cara kerja tersebut yang disusun awal oleh pemerintah khususnya pihak BPBD, masyarakat sangat terbantu sekali oleh tindakan tersebut apalagi masyarakat yang sebagian besar di tempat rawan bencana.

### 3. Kerjasama Feed Back (*feed back cooperation*)

Kerjasama *feed back* adalah upaya menetralisasi dampak dari suatu kejadian dan memberikan rasa aman terhadap masyarakat dan mengeluarkan kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat karena masalah yang terjadi. Berikut beberapa kerjasama feed back yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna menetralsir dari sebuah kejadian sebelumnya :

#### 3. a..Evaluasi Analisis Meteorologi (BMKG)

Evaluasi analisis meteorologi adalah upaya mencari tahu penyebab datangnya hujan selama tiga hari tersebut agar supaya prospek kedepan dapat di ketahui. Berikut hasil wawancara bersama kepala BMKG kota bima dengan mengemukakan hal yang sama dengan informan sebelumnya terkait bagaimana kerjasama feed back (*feed back cooperation*) dalam hal ini

evaluasi analisis yang di lakukan pemerintah dalam penanggulangan dampak perubahan iklim di kota bima.

“kerjasama *feed back* yang kami lakukan dari Pemerintah Pusat pihak BMKG dalam hal ini Evaluasi analisis yaitu mencari tahu penyebab datangnya hujan dan angin kencang yang di sertai petir tersebut kemudian data dari hasil analisis kami berikan kepada pemerintah daerah agar supaya lebih memperhatikan masalah perubahan iklim ini, analisis semua unsur cuaca menyimpulkan bahwa adanya dua tekanan rendah di samudra hindia sebelah selatan bali dan NTT yang mengakibatkan perlambatan dan belokan angina, kondisi itu menyebabkan pertumbuhan awan cb yg memberi peluang hujan yang berkelanjutan.  
(Wawancara DY, 10 Desember 2017)

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kerjasama *feed back* yang dilakukan BMKG Kota Bima merupakan bentuk kerjasama yang bertujuan untuk menganalisa penyebab terjadinya perubahan iklim yang tidak menentu sehingga menyebabkan terjadinya hujan yang disertai petir dengan intensitas yang tinggi, atas perubahan iklim yang tidak menentu tersebut sehingga terjadinya banjir bandang di kota bima yang menyebabkan kerugian yang cukup besar.

#### b. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalanya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Berikut hasil wawancara dengan pihak BPBD terkait bagaimana kerjasama *feed back* yang di lakukan pemerintah daerah dalam hal ini rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanggulangan dampak perubahan iklim di kota bima.

beliau menyatakan bahwa :

“Kami dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mendata keseluruhan dampak dari banjir tersebut, kemudian kami melakukan pembangunan untuk rumah susun sederhana untuk tempat tinggal korban yang rumahnya hanyut, kemudian untuk sementara kami dalam proses perbaikan infastruktur agar supaya masyarakat tetap melakukan kegiatan hari harinya sehingga dapat menormalisasi kebutuhan ekonomi masyarakat, kemudian kami melakukan perbaikan di kantor pemerintah agar supaya berjalannya pelayanan publik seperti biasanya yang diharapkan oleh masyarakat, ( Wawancara, Sf, 7 desember 2017)

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kerjasama *feed back* yang di lakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi sudah sangat evektif, di lihat dengan cara pembangunan kembali infrastuktur meski masih dalam proses adalah bentuk pertanggung jawaban penuh pemerintah untuk masyarakat korban banjir yang ada dikota bima.

Penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat korban banjir kota bima dengan mengemukakan hal yang sama dengan informan sebelumnya terkait bagaimana kerjasama *feed back* yang dilakukan pemerintah terhadap penanggulangan dampak perubahan iklim dikota bima, beliau mengatakan bahwa :

“Saya sebagai korban banjir menganggap kerjasama *feed back* yang di lakukan pemerintah sudah baik nak, karena kami menganggap di bangun kembalinya jalan-jalan yang rusak,sebagai masyarakat kami menganggap itu bentuk tanggung jawab besar apa yang di lakukan pemerintah, di sisi lain juga nak yang kehilangan tempat tinggal juga Alhamdulillah di siapkan rumah susun sama pemerintah nak, kami sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah. (wawancara, AH 23 Desember 2017)

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kerjasama *feed back* yang di lakukan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal melakukan analisis tentang proses perubahan iklim yang menyebabkan pengumpulan awan Cb menghasilkan hujan yang berintensitas tinggi dan melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah bentuk pertanggung jawaban pemerintah untuk masyarakat korban banjir Kota Bima, rehabilitasi dengan menyiapkan rumah susun adalah jalan alternatif untuk korban banjir yang kehilangan tempat tinggal akibat dari dampak dari perubahan iklim tersebut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanggulangan dampak perubahan iklim dikota bima. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa variable (1) kerjasama yang dilakukan Pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah dalam penanggulangan dampak perubahan iklim di Kota Bima yaitu kerjasama pendahuluan dengan melakukan sosialisasi bahaya forestrasi dan membentuk kelurahan tangguh bencana sangat efektif dimana masyarakat bisa memberikan kontribusi terhadap antisipasi bencana dan mengetahui dampak dari dari penebangan pohon secara berlebihan, masyarakat juga dapat mandiri mengenai dampak perubahan iklim dan mengetahui bagaimana menghadapi bencana dengan terarah dan terencana (2) pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melakukan kerjasama saat kerja berlangsung, dalam hal dengan melakukan informasi peringatan dini yang di serahkan kepada pemerintah daerah khusus BPBD dan juga untuk masyarakat agar supaya mempersiapkan diri dari bahaya yang terjadi kedepanya, kemudian pemerintah daerah dalam hal ini BPBD yang dibantu dinas terkait Turun langsung di lapangan dengan dengan melakukan kegiatan tanggap darurat yaitu mengefakuasi korban banjir dan menyelamatkan barang-barang berharga korban, selain itu menyiapkan tenda sederhana dan meberikan logistic kepada masyarakat korban banjir, keikutsertaan dan memberikan kontribusi tersebut sangat bermanfaat dan sangat berdampak besar bagi

masyarakat korban banjir dikota bima (3) dalam hal kerjasama feed back pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penanggulangan dampak perubahan iklim melakukan menganalisa proses penyebab terjadinya hujan yang berdurasi cukup lama kemudian hasilnya di serahkan kepada pemerintah daerah agar supaya lebih memperhatikan dengan betul masalah perubahan iklim tersebut kemudian pemerintah daerah dibantu oleh pemerintah pusat melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu perbaikan terhadap dampak dari banjir dan menyiapkan rumah susun sederhana agar supaya masyarakat korban banjir sedikit terbantu dengan musibah dampak dari perubahan iklim tersebut dimana kebanyakan korban banjir kehilangan rumah.

#### **B. Saran**

Dengan memperhatikan kesimpulan diatas dan menganalisa hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis perlu memberikan masukan sebagai berikut:

1. Pemerintah Seharusnya berperan penting dalam melakukan kerjasama dalam penanggulangan dampak dari perubahan iklim dimana pemerintah tersebutlah yang berperan penting terhadap masalah tersebut.
2. Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah lebih meningkatkan lagi kerjasama dalam penanggulangan dampak perubahan iklim tersebut.
3. Pemerintah lebih memperhatikan sepenuhnya kepada masyarakat korban banjir kota bima yang kehilangan tempat tinggal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syaiful. 2004. *Sendi-Sendi Hukum. Administrasi Negara*. Glora Madani Pres, hlm 127
- Firman, 2015 “*Hamidi, 2004:3 metode penelitian*” dalam skripsi :338 perpustakaan Unismuh Makassar
- Fahmi, 2012, *Manajemen Pemerintah Daerah, Graha Media*, Yogyakarta
- Febriani 2015. Pengawasan Pemerintah dalam Tata Kelembagaan. Di akses pada 09 agustus 2017 pyia. Wordpress.com/2010/01/03 tugas-teori-organissi-umum/
- Harmoni, A. 2006. *Dampak Sosial Ekonomi Perubahan iklim*. Fakultas Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi, Universitas Gunadarma. Depok.
- Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 101.
- Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2012..hlm.50
- Guru pendidikan. Com 2014
- Copyright, 2018. *Edukasi indonesia*. (edukasinesia.com)
- Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, h. 279-288. <http://pengertianadalahdefinisi.blogspot.co.id/2013/12/pengertian-pemerintahan-pusat-daerah.html>
- Landon M. 2006. *Environment, Health and Sustainable Development*
- Kadarman. 2001. *Pengantar ilmu manajemen jakarta* :Prehallindo Manullang, M.OP.Cit.hlm.183
- Pats J.A. Dan Kovats R.S. 2002. *Hot spots in climate change and human health*. British Medical journal.325:1094-1098.
- Philander, S.G., 2007. El Nino, *La Nina and Southern Oscillation*, international Geophysics Series, Vol. 46, Academic press.
- Prajudi, 2004, *Hukum Adminstrasi Negara. Ghalia Indonesia*. Jakarta Hlm. 80
- Sembiring, Masana. 2012. *Budaya dan Kinerja Organisasi*. Bandung : Fokus Media
- Siagian P. Sondang. 2016, *Fungsi-Fungsi manajerial Jakarta*, Bumi Aksara.

- Susilo, P., 2008. *Radiasi Matahari di Bandung dan Sekitarnya*, Laporan Penelitian No. 2472378, Badan Riset, ITB.
- Trenbert, K. E., 2005. El Nino definition, *Warkshop on ENSO and Monsoon*, ICTP, Trieste, Italy
- Yasunari, T., 2008. *Role of Monsoon on Global climate*, the 3 International Symposium on Equatorial Atmosphere Observations over Indonesia RASC-BPPT-LAPAN, Bandung.

